

## **BAB IV**

### **REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran perubahan APBD Tahun 2006, terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp15.327.795.967.748,00, sampai dengan Desember 2006 realisasinya sebesar Rp14.337.618.501.100,53 atau 93,54 persen. Dari realisasi tersebut terlihat target yang tidak dapat dicapai adalah sebesar Rp 990.177.466.647,47 atau 6,46 persen.
  
- Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp18.172.351.462.520,00 sampai dengan Desember 2006 realisasi sebesar Rp15.161.577.796.205,80 atau 83,43 persen sehingga terdapat sisa sebesar Rp3.010.773.666.314,20. Apabila realisasi Belanja ini dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka terlihat adanya defisit anggaran sebesar Rp 823.959.295.105,27 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.1.
  
- Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan Penerimaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp3.107.087.920.428,00 realisasi sebesar Rp3.107.087.920.428,39 terdapat pelampuan sebesar Rp0,39 dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah diproyeksikan sebesar Rp262.532.425.656,00, realisasi sebesar Rp262.532.421.813,00 terdapat sisa sebesar Rp3.843,00

Berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

sebesar Rp2.020.596.203.510,12 Sisa lebih tersebut akan dialokasikan sebagai Pembiayaan Penerimaan Daerah, Komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

Gambaran umum realisasi APBD Tahun Anggaran 2006 secara garis besar dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

**TABEL 4.1**  
**Realisasi APBD pada perhitungan APBD**  
**Tahun Anggaran 2006**

No	Uraian	Tahun Anggaran		Berlebih (Berkurang) 5 (4-3)
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5 (4-3)
I	<b>Pendapatan Daerah</b>	15.327.795.967.748,00	14.337.618.501.100,53	(990.177.466.647,47)
II	<b>Belanja Daerah</b>	18.172.351.462.520,00	15.161.577.796.205,80	(3.010.773.666.314,20)
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(2.844.555.494.772,00)</b>	<b>(823.959.295.105,27)</b>	<b>2.020.596.199.666,73</b>
III	<b>Pembiayaan Daerah :</b>			
	<b>1. Penerimaan Daerah</b>	<b>3.107.087.920.428,00</b>	<b>3.107.087.920.428,39</b>	<b>0,39</b>
	▪ Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	2.808.713.836.800,00	2.808.713.836.800,39	0,39
	▪ Transfer dari Dana Cadangan	298.374.083.628,00	298.374.083.628,00	0,00
	<b>2. Pengeluaran Daerah</b>	<b>262.532.425.656,00</b>	<b>262.532.421.813,00</b>	<b>(3.843,00)</b>
	▪ Penyertaan Modal Pemerintah	223.908.851.656,00	223.908.851.656,00	0,00
	▪ Pembayaran Hutang Pokok	38.623.574.000,00	38.623.570.157,00	(3.843,00)
	<b>3. Pembiayaan Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.020.596.203.510,12</b>
	▪ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	2.020.596.203.510,12

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Selanjutnya sesuai urutan struktur APBD berikut dijelaskan uraian tentang realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## A. PENDAPATAN DAERAH

Dari realisasi pendapatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disampaikan secara garis besar rincian sebagai berikut. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp 7.817.545.125.577,53 atau 90,20 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp8.666.795.967.748,00. Dari realisasi ini terlihat target PAD yang tidak dapat dicapai sebesar Rp 849.250.842.470,47 atau 9,80 persen. Untuk Dana Perimbangan, dari anggaran Rp6.661.000.000.000,00 realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar Rp6.520.073.375.823,00 atau 97,88 persen.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

**TABEL 4.2**  
**Realisasi Pendapatan Daerah pada Perhitungan APBD**  
**Tahun Anggaran 2006**

Jenis	Tahun Anggaran 2006			Δ%
	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
❖ Pendapatan Asli Daerah	8.666.795.967.748,00	7.817.545.125.277,53	(849.250.842.470,47)	90,20
❖ Dana Perimbangan	6.661.000.000.000,00	6.520.073.375.823,00	(140.926.624.177,00)	97,88
<b>JUMLAH</b>	<b>15.327.795.967.748,00</b>	<b>14.337.618.501.100,53</b>	<b>(990.177.466.647,47)</b>	<b>93,54</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 Realisasi PAD mencapai Rp7.817.545.125.277,53 atau 90,20 persen, dari anggaran yang ditetapkan Rp8.666.795.967.748,00. Dari realisasi ini terlihat target PAD yang belum dapat dicapai adalah sebesar Rp 849.250.842.470,47 atau 9,80 persen, sedangkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah 54,52 persen.

Walaupun realisasi PAD tidak mencapai target, namun upaya-upaya tetap dilakukan secara optimal seperti;

- Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- Serta kerja keras untuk meningkatkan PAD yang telah dilakukan oleh petugas-petugas pemungut di lapangan.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

**TABEL 4.3**  
**Realisasi PAD pada Perhitungan APBD**  
**Tahun Anggaran 2006**

Uraian	Tahun Anggaran 2006			Δ%
	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Pajak Daerah	7.149.000.000.000,00	6.482.649.163.338,00	(666.350.836.662,00)	90,68
▪ Retribusi Daerah	472.531.996.600,00	449.340.321.740,00	(23.191.674.860,00)	95,09
▪ Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	132.335.966.854,00	131.903.430.824,00	(432.536.030,00)	99,67
▪ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	912.928.004.294,00	753.652.209.375,53	(159.275.794.918,47)	82,55
<b>JUMLAH</b>	<b>8.666.795.967.748,00</b>	<b>7.817.545.125.277,53</b>	<b>(849.250.842.470,47)</b>	<b>90,20</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini.

#### a. Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 seperti nampak pada tabel tersebut diatas, ternyata tidak dapat mencapai target sesuai anggaran yang ditetapkan. Adapun anggaran yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp7.149.000.000.000,00, realisasinya hanya mencapai Rp6.482.649.163.338,00 atau 90,68 persen. Dengan demikian target yang tidak dapat dicapai adalah sebesar Rp666.350.836.662,00 atau 9,32 persen. Dari realisasi tersebut, terlihat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 82,92 persen.

Penerimaan pajak tersebut diatas, telah diperoleh dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor, realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp2.247.581.506.366,00 atau 96,38 persen;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.809.282.164.353,00 atau 73,85 persen;

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp632.724.670.698,00 atau 100,91 persen;
- Pajak Hotel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp474.268.230.915,00 atau 97,79 persen;
- Pajak Restoran realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp431.118.845.910,00 atau 103,88 persen;
- Pajak Hiburan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp169.018.037.047,00 atau 112,68 persen;
- Pajak Reklame realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp234.243.268.630,00 atau 104,11 persen;
- Pajak Penerangan Jalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp341.076.464.056,00 atau 104,95 persen;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp59.129.567.846,00 atau 98,55 persen;
- Pajak Parkir sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp84.206.407.517,00 atau 105,26 persen.

Gambaran realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat pada tabel 4.4

**TABEL 4.4**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Perhitungan**  
**APBD Tahun Anggaran 2006**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	2.332.000.000.000,00	2.247.581.506.366,00	(84.418.493.634,00)	96,38
2.	BBN Kendaraan Bermotor	2.450.000.000.000,00	1.809.282.164.353,00	(640.717.835.647,00)	73,85
3.	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	627.000.000.000,00	632.724.670.698,00	5.724.670.698,00	100,91
4.	Pajak Hotel	485.000.000.000,00	474.268.230.915,00	(10.731.769.085,00)	97,79
5.	Pajak Restoran	415.000.000.000,00	431.118.845.910,0	16.118.845.910,00	103,88
6.	Pajak Hiburan	150.000.000.000,00	169.018.037.047,00	19.018.037.047,00	112,68

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
7.	Pajak Reklame	225.000.000.000,00	234.243.268.630,00	9.243.268.630,00	104,11
8.	Pajak Penerangan Jalan	325.000.000.000,00	341.076.464.056,00	16.076.464.056,00	104,95
9.	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	60.000.000.000,00	59.129.567.846,00	(870.432.154,00)	98,55
10.	Pajak Parkir	80.000.000.000,00	84.206.407.517,00	4.206.407.517,00	105,26
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.149.000.000.000,00</b>	<b>6.482.649.163.338,00</b>	<b>(666.350.836.662,00)</b>	<b>90,68</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan jenis-jenis Pajak Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 akan diuraikan sebagai berikut;

### 1). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp2.247.581.506.366,00 atau 96,38 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.332.000.000.000,00. Sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan pajak ini targetnya tidak tercapai Rp84.418.493.634,00 atau 3,62 persen. Dari realisasi tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka terlihat kontribusi pendapatan PKB terhadap Pajak Daerah mencapai 34,67 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan;

- Kondisi pertumbuhan jumlah kendaraan negatif
- Menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor otomotif
- Konsumsi otomotif tidak menjadi obyek pilihan utama bagi masyarakat
- Menurunnya produksi dalam negeri.

Dengan tidak tercapainya target realisasi penerimaan PKB di Tahun Anggaran 2006 berbagai langkah dan upaya dilakukan secara optimal seperti :

- Penyampaian Surat pemberitahuan (Super) PKB secara intensif.

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait maupun pihak swasta seperti Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), pengusaha/pemilik showroom dan Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor dan Gaikindo.
- Peningkatan pendataan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di kawasan tertentu.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak, seperti pelayanan samsat keliling.
- Penelitian dan pendataan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang.
- Koordinasi pengawasan pembayaran PKB dilakukan lebih intensif melalui operasi/razia bekerja sama dengan pihak kepolisian.

## **2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**

Realisasi penerimaan BBN-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.809.282.164.353,00 atau 73,85 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.450.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 target penerimaan yang tidak dapat dicapai Rp640.717.835.647,00 atau 26,15 persen. Apabila realisasi BBN-KB tersebut diatas dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka terlihat kontribusi BBN-KB terhadap Pajak Daerah jumlahnya mencapai 27,90 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan BBN-KB Tahun Anggaran 2006 disebabkan :

- Kondisi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor negatif;
- Menurunnya daya beli masyarakat karena konsumsi otomotif tidak menjadi objek pilihan utama bagi masyarakat;
- Menurunnya produksi dalam negeri dan import pada sektor otomotif.

Meskipun realisasi penerimaan BBN-KB dalam Tahun Anggaran 2006 tidak mencapai target, namun berbagai langkah dan upaya telah dilakukan antara lain :

- Peningkatan pelayanan pada masyarakat wajib pajak;
- Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta seperti; pengusaha Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), pemilik show room dan asosiasi impotir kendaraan bermotor;

- Peningkatan Pendataan kendaraan bermotor bekas pakai yang diperjualbelikan melalui showroom;
- Peningkatan pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan nilai jual kendaraan bermotor;
- Peningkatan survey dilapangan dan pengumpulan data lainnya untuk menentukan Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta;
- Peningkatan pengawasan pembayaran BBN-I (kendaraan baru) yang tidak dibayar melalui modus ganti nama, ganti nomor chasis dan lainnya.

### **3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

Realisasi penerimaan PBB-KB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp632.724.670.698,00 atau 100,91 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp627.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi pajak ini terlihat adanya peningkatan Rp5.724.670.698,00 atau 0,91 persen. Apabila realisasi PBB-KB tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka kontribusi PBB-KB terhadap Pajak Daerah mencapai 9,76 persen.

Peningkatan penerimaan PBB-KB dicapai dengan berbagai upaya yang intensif seperti;

- Koordinasi dengan PT. Pertamina sebagai wajib pajak dan penyalur Bahan Bakar Kendaraan bermotor lainnya baik melalui kegiatan rekonsiliasi jumlah penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan kaitannya dengan kewajiban yang harus disetorkan;
- Peningkatan survey data potensi objek PBB-KB dan koordinasi dengan instansi terkait pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah DKI Jakarta;
- Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak utamanya dibidang administrasi perpajakan.

Disamping itu, pelampauan pencapaian target penerimaan tersebut disebabkan antara lain :

- Adanya peningkatan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor akibat regulasi kebijakan pemerintah.
- Adanya penambahan penyalur bahan bakar kendaraan bermotor selain PT.Pertamina di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Adanya penambahan jumlah SPBU akibat dari kemudahan dan peluang yang diberikan oleh Pemerintah untuk berinvestasi pada usaha SPBU.
- Dampak positif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua.

#### **4). Pajak Hotel**

Realisasi penerimaan Pajak Hotel dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 Rp474.268.230.915,00 atau 97,79 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp485.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini tidak mencapai target Rp10.731.769.085,00 atau 2,21 persen. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan totalitas realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya Rp6.482.649.163.338,00 maka kontribusi Pajak Hotel mencapai 7,31 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hotel pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan menurunnya jumlah hunian kamar hotel bintang lima dan hotel bintang lima berlian, sebagai dampak berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara sebagai pengguna jasa hotel dan tidak menjadi objek pilihan utama bagi sebagian masyarakat.

Namun demikian dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak ini, berbagai langkah dan upaya yang optimal telah dilakukan seperti :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran masa Pajak Hotel;
- Penagihan secara intensif atas tunggakan Pajak Hotel termasuk penagihan dengan surat paksa;
- Pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem Self Assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;

- Peningkatan pendataan di lapangan, untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar;
- Peningkatan pengawasan melalui *law enforcement* berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### **5). Pajak Restoran**

Realisasi penerimaan Pajak Restoran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp431.118.845.910,00 atau 103,88 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp415.000.000.000,00. Dengan demikian, pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terjadi pelampauan target penerimaan sebesar Rp16.118.845.910,00 atau 3,88 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka terlihat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah mencapai 6,65 persen.

Keberhasilan pencapaian target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2006, didorong oleh beberapa hal antara lain :

- Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat;
- Kondisi sosial politik Indonesia ditahun 2006 berjalan lebih kondusif sehingga dapat mendukung pertumbuhan disektor pariwisata;
- Adanya peningkatan jumlah kunjungan ke rumah-rumah makan / restoran masih merupakan pilihan sebagai objek konsumtif untuk keperluan keluarga;
- Adanya peningkatan jumlah objek rumah makan/restoran di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Disamping itu, pelampauan target penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan, antara lain Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;

- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;

- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem self assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Peningkatan pendataan dilapangan untuk menjaring wajib pajak yang belum mendaftar (belum mempunyai NPWPD);
- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran massa Pajak Restoran.
- Peningkatan Pengawasan melalui law enforcement, berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey dan observasi dilapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak sehingga dapat data pembanding.

#### **6). Pajak Hiburan**

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp169.018.037.047,00 atau 112,68 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp150.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi pajak ini targetnya mengalami peningkatan Rp19.018.037.047,00 atau 12,68 persen. Apabila realisasi Pajak Hiburan tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah mencapai 2,60 persen.

Pelampauan target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2006, didorong antara lain oleh :

- Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat;
- Adanya peningkatan jumlah kunjungan ke tempat-tempat hiburan, karena tempat hiburan masih merupakan alternatif yang cukup tinggi peminatnya bagi masyarakat sebagai objek konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hiburan;
- Adanya peningkatan jumlah objek Pajak Hiburan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Disamping itu, keberhasilan pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan, seperti :

- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey atau persuasif di lapangan guna mendapatkan data atau informasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya;
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembayaran setoran massa Pajak Hiburan serta mengupayakan perbaikan terhadap setoran massa yang tidak wajar;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem self assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat;
- Penagihan yang lebih intensif yakni dilakukan penagihan dengan surat paksa;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak.

#### **7). Pajak Reklame**

Realisasi penerimaan Pajak Reklame sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp234.243.268.630,00 atau 104,11 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp225.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi Pajak Reklame dapat melampaui target yang ditetapkan Rp9.243.268.630,00 atau 4,11 persen.

Apabila realisasi Pajak Reklame dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah mencapai 3,61 persen.

Pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Reklame pada Tahun Anggaran 2006 disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan, yaitu :

- Peningkatan pengawasan pembayaran/setoran Pajak Reklame;
- Peningkatan pengawasan dilapangan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;

- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban baik terhadap reklame liar maupun reklame yang telah habis masa berlaku izinnya;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem self assesment, sehingga tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat.

#### **8). Pajak Penerangan Jalan**

Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp341.076.464.056,00 atau 104,95 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp325.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi penerimaan pajak ini terjadi pelampauan Rp16.076.464.056,00 atau 4,95 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah mencapai 5,26 persen.

Upaya-upaya untuk pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan intensif seperti:

- Peningkatan jumlah konsumen pengguna tenaga listrik dari PT. PLN akibat dari pertumbuhan sentra-sentra bisnis dan bidang properti;
- Peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan PT. PLN sebagai mitra kerja dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Adanya kenaikan tarif dasar listrik, yang turut mendorong peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- Peningkatan pengawasan terhadap penyeteroran Pajak Penerangan Jalan

#### **9). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Realisasi penerimaan pajak ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp59.129.567.846,00 atau 98,55 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp60.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun

Anggaran 2006, target penerimaan yang tidak dapat dicapai Rp870.432.154,00 atau 1,45 persen.

Apabila realisasi penerimaan pajak ini dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00, maka terlihat kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pajak Daerah mencapai 0,91 persen.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disebabkan :

- Pajak ini bersifat regulasi sehingga pemungutan pajaknya lebih diarahkan kepada pengaturan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
- Adanya pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, seperti menjamurnya bisnis pencucian kendaraan yang tidak diikuti dengan pengaturan kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemungutan pajaknya

Walaupun pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tidak dapat dicapai, namun tetap dilakukan berbagai langkah dan upaya seperti :

- Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pendataan terhadap titik-titik sumur air bawah tanah bekerjasama dengan Dinas Pertambangan, untuk menjaring wajib pajak yang belum terdaftar(belum mempunyai NPWPD);
- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- Peningkatan kegiatan survey/observasi di lapangan, guna diperoleh data atau informasi wajib pajak.

#### **10).Pajak Parkir**

Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp84.206.407.517,00 atau 105,26 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp80.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi Pajak Parkir terjadi pelampauan target penerimaan Rp4.206.407.517,00 atau 5,26 persen.

Apabila realisasi penerimaan pajak ini dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang jumlahnya mencapai Rp6.482.649.163.338,00 maka terlihat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak daerah mencapai 1,29 persen.

Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Parkir disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang positif dari sektor properti khususnya bagi sentra-sentra bisnis, seperti pembangunan apartemen, mall, plaza yang mendorong para investor untuk membuka usaha perparkiran swasta.

Disamping itu, keberhasilan pelampauan pencapaian target penerimaan Pajak Parkir disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan, seperti :

- Peningkatan pengawasan pembayaran setoran Pajak Parkir;
- Peningkatan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak;
- Peningkatan pengawasan melalui law enforcement berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kegiatan survey/observasi dilapangan guna diperoleh data wajib pajak;
- Peningkatan pembinaan kepada wajib pajak atas perlakuan pemajakan dengan sistem self assesment sehingga tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat.

#### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp449.340.321.740,00 atau 95,09 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp 472.531.996.600,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target penerimaan sebesar Rp23.191.674.860,00 atau 4,91 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya Rp7.817.545.125.277,53 maka kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 5,75 persen.

Walaupun realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat mencapai target, namun berbagai upaya yang intensif dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat;
- Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- Peningkatan pengawasan di lapangan;
- Peningkatan koordinasi antara unit pemungut dengan unit satuan kerja terkait

Berikut disajikan rincian realisasi Retribusi Daerah pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tergambar pada tabel 4.5

**TABEL 4.5**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah pada Perhitungan**  
**APBD Tahun Anggaran 2006**

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
01	Pelayanan Kesehatan	145.074.706.600,00	112.916.166.583,00	(32.158.540.017,00)	77,83
02	Pelayanan Persampahan	6.793.040.000,00	7.760.634.700,00	967.594.700,00	114,24
03	Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akte Catatan Sipil	1.171.425.000,00	3.239.591.000,00	2.068.166.000,00	276,55
04	Penggantian Akte Catatan Sipil	1.748.410.000,00	1.886.525.000,00	138.115.000,00	107,90
05	Pemakaman	6.234.035.000,00	7.063.902.000,00	829.867.000,00	113,31
06	Parkir di Tepi Jalan Umum	20.500.000.000,00	14.404.058.462,00	(6.095.941.538,00)	70,26
07	Pengujian Kendaraan Bermotor	26.720.000.000,00	23.030.849.000,00	(3.689.151.000,00)	86,19
08	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	947.859.000,00	992.128.322,00	44.269.322,00	104,67
09	Penggantian Biaya Cetak Peta	475.000.000,00	925.128.009,00	450.128.009,00	194,76
10	Pengujian Kapal Perikanan	850.000,00	-	(850.000,00)	-
11	Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	26.271.152.000,00	22.563.331.318,00	(3.707.820.682,00)	85,89
12	Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	2.340.000.000,00	2.375.578.122,00	35.578.122,00	101,52

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
13	Jasa Usaha Terminal	10.800.487.500,00	8.311.627.097,00	(2.488.860.403,00)	76,96
14	Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	6.450.000.000,00	3.182.075.745,00	(3.267.924.255)	49,33
15	Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangg./Villa	1.900.000.000,00	2.318.765.000,00	418.765.000,00	122,04
16	Jasa Usaha Penyedotan Kakus	1.175.760.000,00	1.405.417.000,00	229.657.000,00	119,53
17	Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	1.305.500.000,00	1.299.834.250,00	(5.665.750,00)	99,57
18	Jasa Usaha Tempat Pendaratan Kapal	19.650.000,00	16.157.000,00	(3.493.000,00)	82,22
19	Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.873.976.000,00	14.120.291.750,00	(4.753.684.250,00)	74,81
20	Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.120.500.000,00	104.672.300,00	(2.015.827.700,00)	4,94
21	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	10.000.000.000,00	16.663.703.186,00	6.663.703.186,00	166,64
22	Izin Mendirikan Bangunan	159.800.000.500,00	190.483.400.507,00	30.683.400.007,00	119,20
23	Izin Gangguan	2.800.000.000,00	3.415.378.621,00	615.378.621,00	121,98
24	Izin Trayek	1.800.000.000,00	1.531.050.000,00	(268.950.000,00)	85,06
25	Retribusi UKM	9.841.425.000,00	2.135.620.500,00	(7.705.804.500,00)	21,70
26	Retribusi Pertambangan	2.656.600.000,00	1.050.076.268,00	(1.606.523.732,00)	39,53
27	Perizinan dibidang Perindag.	4.711.620.000,00	6.030.170.000,00	1.318.550.000,00	127,99
28	Pelayanan Ketenagakerjaan	-	114.190.000,00	114.190.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>472.531.996.600,00</b>	<b>449.340.321.740,00</b>	<b>(23.191.674.860,00)</b>	<b>95,09</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

### 1). Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp112.916.166.583,00 atau 77,83 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp145.074.706.600,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target sebesar Rp32.158.540.017,00 atau 22,17 persen.

Selanjutnya realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana disajikan lebih rinci pada tabel 4.6

**TABEL 4.6**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

NO	Unit Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Rawat Jalan Kesehatan Dasar	31.011.747.700,00	22.353.801.564,00	(8.657.946.136,00)	72,08
2	Rawat Jalan Semi Spesialis	4.036.302.000,00	2.485.075.175,00	(1.551.226.825,00)	61,57
3	Rawat Jalan Tindakan Khusus	8.926.888.000,00	6.299.521.982,00	(2.627.366.018,00)	70,57
4	Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana	8.975.876.000,00	4.228.473.689,00	(4.747.402.311,00)	47,11
5	Rawat Inap	7.843.791.000,00	3.284.793.789	(4.558.997.211,00)	41,88
6	Poliklinik Spesialis Pagi	7.412.625.000,00	9.954.733.107,00	2.542.108.107,00	134,29
7.	Kamar Gawat Darurat	5.217.985.340,00	5.718.967.239,00	500.981.899,00	109,60
8.	Perawatan	24.236.677.736,00	23.932.546.425,00	(304.131.311,00)	98,75
9.	Perawatan Isolasi Perhari	1.666.250.000,00	157.895.192,00	(1.508.354.808,00)	9,48
10.	Perawatan Neonatus Perhari	396.250.000,00	59.003.271,00	(337.246.729,00)	14,89
11.	Perawatan Neonatus dengan Blue Light Per hari	888.000.000,00	252.776.142,00	(635.223.858,00)	28,47
12.	Adm Perawatan Perhari/Setiap perawatan	1.498.126.000,00	837.298.789,00	(660.827.211,00)	55,89
13.	Patologi Klinik	11.971.722.468,00	10.399.017.589,00	(1.572.704.879,00)	86,86
14.	Patologi Klinik Anatomi	73.831.000,00	44.093.497,00	(29.737.503,00)	59,72
15.	Pemeriksaan Radio Diagnostik	3.858.707.238,00	2.597.132.803,00	(1.261.574.435,00)	67,31
16.	Pemeriksaan Elektromedik	3.538.899.000,00	1.805.952.915,00	(1.732.946.085,00)	51,03
17.	Kamar bersalin/ Rawat Jalan/ Inap/ Tindakan Ringan	6.567.432.760,00	5.351.370.671,00	(1.216.062.089,00)	81,48
18.	Kamar Operasi	8.970.466.000,00	7.227.755.646,00	(1.742.710.354,00)	80,57
19.	Kamar bersalin kls III	940.050.000,00	498.325.010,00	(441.724.990,00)	53,01
20.	Tindakan Gigi/Mulut	2.597.778.622,00	1.829.846.090,00	(767.932.532,00)	70,44
21.	Rehabilitasi Medik	1.109.285.736,00	719.648.926,00	(389.636.810,00)	64,87
22.	Perawatan Jenazah	109.615.000,00	74.129.942,00	(35.485.058,00)	67,63
23.	Bedah Rawat Jalan	1.681.400.000,00	2.191.477.639,00	510.077.639,00	130,34
24.	Perawatan Bayi Sakit perhari	-	-	-	0,00
25.	Pel.Khusus RSUD Psikiatri&NAPZA	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)	0,00
26.	Pel. Khusus RSUD Psikologi	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	0,00
27.	Pel. Khusus RSUD Rehab Medik/Mental	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	0,00
28.	Lain-lain Pelayanan Kesehatan	-	612.529.491,00	612.529.491,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>145.074.706.600,00</b>	<b>112.916.166.583,00</b>	<b>(32.158.540.017,00)</b>	<b>77,83</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Target realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak tercapai antara lain disebabkan pelayanan kesehatan dari poliklinik spesialis tidak dapat dibuka setiap hari di Puskesmas Swadana, sehingga berdampak kepada penurunan realisasi pendapatan. Langkah dan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi ini, secara intensif yaitu antara lain; Peningkatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas.

## **2). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp7.760.634.700,00 atau 114,24 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp6.793.040.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terjadi peningkatan Rp967.594.700,00 atau 14,24 persen.

Tercapainya target realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didukung oleh berbagai upaya antara lain :

- Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi;
- Peningkatan koordinasi dengan unit terkait, dalam upaya pemberdayaan RT/RW dalam pemungutan retribusi sampah.

## **3). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk**

Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.239.591.000,00 atau 276,55 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.171.425.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, target penerimaan retribusi ini terjadi peningkatan Rp2.068.166.000,00 atau 176,55 persen.

Pelampauan penerimaan retribusi yang sangat signifikan ini utamanya diperoleh dari penggantian biaya cetak kartu keluarga (KK), biaya cetak KTP dan biaya cetak pencatatan mutasi data.

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP antara lain :

- Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai peraturan-peraturan kependudukan, sehingga dengan sosialisasi ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kependudukan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi.

#### **4). Retribusi Pelayanan Pemakaman**

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp7.063.902.000,00 atau 113,31 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp6.234.035.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terdapat pelampauan target penerimaan Rp829.867.000,00 atau 13,31 persen.

Pelampauan target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, diperoleh dari sewa tanah makam dan perpanjangan sewa tanah makam. Upaya yang dilakukan adalah penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan Yayasan yang bergerak dibidang Pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

#### **5). Retribusi Parkir**

Realisasi penerimaan Retribusi Parkir sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp14.404.058.462,00 atau 70,26 persen dari proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp20.500.000.000,00. Dengan demikian realisasi Retribusi Parkir tidak mencapai target sebesar Rp6.095.941.538,00 atau 29,74 persen.

Realisasi Retribusi Parkir tidak mencapai target karena kebijakan peyesuaian tarif retribusi ini baru berlaku efektif 1 Juli 2006, disamping itu tarif Retribusi Parkir pada Kawasan Pengendalian Parkir (KPP) baru dapat diberlakukan pada bulan Desember 2006 karena masih dalam tahap uji coba pada lokasi tertentu.

Walaupun terjadi penurunan penerimaan Retribusi Parkir, namun upaya-upaya yang intensif tetap dilakukan seperti :

- Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan perparkiran.
- Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Survey potensi parkir yang intensif sebagai tolok ukur pengawasan.

Penerimaan retribusi parkir tersebut di atas, bersumber dari Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Realisasi pendapatan terhadap 2 (dua) jenis Retribusi Parkir disajikan pada tabel 4.7.

**TABEL 4.7**  
**Realisasi pendapatan Retribusi Parkir pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Parkir di Tepi Jalan Umum	10.250.000.000,00	10.429.499.862,00	179.499.862,00	101,75
2	Tempat Khusus Parkir	10.250.000.000,00	3.974.558.600,00	(6.275.441.400,00)	38,78
	<b>Jumlah</b>	<b>20.500.000.000,00</b>	<b>14.404.058.462,00</b>	<b>(6.095.941.538,00)</b>	<b>70,26</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

#### 6). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp23.030.849.000,00 atau 86,19 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 Rp26.720.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target Rp3.689.151.000,00 atau 13,81 persen. Turunnya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan volume kendaraan baru yang melakukan uji coba hanya mencapai 50 kendaraan, turun dibandingkan tahun 2005 yang jumlahnya mencapai 200 unit.

Walaupun target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak tercapai, namun berbagai upaya dilakukan seperti :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- Peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan umum bekerja sama dengan instansi terkait.

## 7). Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp22.563.331.318,00 atau 85,89 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp26.271.152.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp 3.707.820.682,00 atau 14,11 persen.

Realisasi penerimaan retribusi tersebut, bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja.

Adapun realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 disajikan lebih rinci pada tabel 4.8.

**TABEL 4.8**  
**Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Dinas Pertamanan	400.000.000,00	369.390.500,00	(30.609.500,00)	92,35
2.	Dinas Pekerjaan Umum	2.400.000.000,00	1.638.306.843,00	(761.693.157,00)	68,26
3.	Dinas Perhubungan	680.000.000,00	539.739.500,00	(140.260.500,00)	79,37
4.	Dinas Perumahan	5.200.000.000,00	3.049.225.056,00	(2.150.774.944,00)	58,64
5.	Pemakaian gedung milik pemda	150.000.000,00	168.750.000,00	18.750.000,00	112,50
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	52.141.000,00	34.400.000,00	(17.741.000,00)	65,97
7.	Dinas Kebersihan	31.200.000,00	28.925.000,00	(2.275.000,00)	92,71
8.	Bapedalda	1.050.000.000,00	853.187.000,00	(196.813.000,00)	81,26
9.	Dinas Olah Raga	522.199.000,00	730.094.100,00	207.895.100,00	139,81
10.	Dinas PJU dan SJU	3.000.000.000,00	806.899.854,00	(2.193.100.146,00)	26,90
11.	Kantor Tm. Ragunan	5.129.825.000,00	4.032.240.500,00	(1.097.584.500,00)	78,60
12.	Dinas Museum dan Kebudayaan	74.000.000,00	69.600.000,00	(4.400.000,00)	94,05
13.	Dinas Tata Pemakaman Umum	515.965.000,00	324.964.000,00	(191.001.000,00)	62,98
14.	Dinas Perindustrian	1.826.600.000,00	1.599.199.600,00	(227.400.400,00)	87,55
15.	Dinas Peternakan Perikanan & Kelautan	3.030.780.000,00	2.926.576.444,00	(104.203.556,00)	96,56
16.	Dinas Kependudukan	80.165.000,00	36.653.200,00	(43.511.800,00)	45,72

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
17.	Dinas Pertanian & Kehutanan	644.500.000,00	4.231.676.290,00	3.587.176.290,00	656,58
18.	RSUD Koja	115.277.000,00	-	(115.277.000,00)	0,00
19.	RSUD Budhi Asih	52.500.000,00	159.900,00	(52.340.100,00)	0,30
20.	RSUD Tarakan	19.125.000,00	-	(19.125.000,00)	0,00
21.	RSUD Duren Sawit	10.000.000,00	4.556.983,00	(5.443.017,00)	45,57
22.	Labkesda	1.286.875.000,00	1.118.786.548,00	(168.088.452,00)	86,94
<b>Jumlah</b>		<b>26.271.152.000,00</b>	<b>22.563.331.318,00</b>	<b>(3.707.820.682,00)</b>	<b>85,89</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

### 8). Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp2.375.578.122,00 atau 101,52 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.340.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan, dapat melampaui target penerimaan Rp35.578.122,00 atau sebesar 1,52 persen.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi, antara lain;

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Penambahan sarana dan prasarana yang disewakan kepada masyarakat;
- Intensifikasi pemungutan retribusi.

### 9). Retribusi Jasa Usaha Terminal

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp8.311.627.097,00 atau 76,96 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp10.800.487.500,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp2.488.860.403,00 atau sebesar 23,04 persen.

Dengan tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Terminal, berbagai upaya dilakukan secara intensif seperti :

- Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal.

#### **10). Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus**

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.405.417.000,00 atau 119,53 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.175.760.000,00 Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terdapat pelampauan target realisasi penerimaan Rp229.657.000,00 atau 19,53 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target realisasi retribusi ini antara lain :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui intensifikasi jangka waktu pelayanan;
- Penempatan pos pelayanan ditempat-tempat tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - Pelayanan untuk konsumen rumah tinggal dilayani dengan kendaraan tangki kecil berkapasitas 3 m<sup>3</sup> oleh masing-masing Suku Dinas Kebersihan Kotamadya,
  - Pelayanan untuk konsumen industri dilayani dengan kendaraan besar berkapasitas 6 m<sup>3</sup> oleh Dinas Kebersihan.

#### **11). Retribusi Rumah Potong Hewan**

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.299.834.250,00 atau 99,57 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.305.500.000,00. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp5.665.750,00 atau 0,43 persen.

Tidak tercapainya target realisasi penerimaan retribusi ini, karena turunnya volume pemeriksaan kesehatan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH), disamping itu dipengaruhi oleh frekuensi pemotongan sapi di RPH pada umumnya adalah sapi import yang beratnya 2 (dua) kali dari sapi lokal, sementara itu biaya retribusi dikenakan berdasarkan satuan ekor.

Walaupun target realisasi penerimaan tidak tercapai, namun upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan ternak potong di rumah potong hewan.
- Peningkatan pengawasan di lapangan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## 12). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp14.120.291.750,00 atau 74,81 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp18.873.976.000,00. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi retribusi yang tidak mencapai target Rp4.753.684.250,00 atau 25,19 persen.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana disajikan pada tabel 4.9.

**TABEL 4.9**  
**Realisasi pendapatan Retribusi Rekreasi dan Olah raga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Pelayanan Museum Daerah	140.000.000,00	162.223.750,00	22.223.750,00	115,87
2.	Pelayanan Monas	2.086.000.000,00	2.186.416.625,00	100.416.625,00	104,81
3.	Pelayanan Planetarium & Obsv	992.000.000,00	737.878.500,00	(254.121.500,00)	74,38
4.	Citraganda/Multimedia	8.000.000,00	17.888.000,00	9.888.000,00	223,60
5.	Pelayanan Keolahragaan	2.077.801.000,00	2.297.345.875,00	219.544.875,00	110,57
6.	Pelayanan Tm. Ragunan	13.570.175.000,00	8.718.539.000,00	(4.851.636.000,00)	64,25
7.	Sanksi Keterlambatan	-	-	-	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.873.976.000,00</b>	<b>14.120.291.750,00</b>	<b>(4.753.684.250,00)</b>	<b>74,81</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Walaupun Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga tidak mencapai target, upaya-upaya dalam rangka pencapaian target tetap dilakukan seperti :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi;
- Peningkatan pelayanan keolahragaan kepada masyarakat;
- Peningkatan pemantauan dan penyuluhan tempat rekreasi dan olah raga secara periodik kepada masyarakat.

### 13). Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp16.663.703.186,00 atau 166,64 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp10.000.000.000,00. Dengan demikian terdapat pelampauan penerimaan Rp6.663.703.186,00 atau 66,64 persen.

Pelampauan realisasi penerimaan retribusi tersebut, didukung berbagai upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak;
- Pelaksanaan pelayanan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya.

### 14). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp190.483.400.507,00 atau 119,20 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp159.800.000.500,00. Dengan demikian terdapat pelampauan realisasi penerimaan Rp30.683.400.007,00 atau 19,20 persen.

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana disajikan pada tabel 4.10.

**TABEL 4.10**

**Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Pelayanan Ketatakotaan	64.800.000.000,00	72.484.077.814,00	7.684.077.814,00	111,85
2	Pelayanan Pengawasan Pembangunan Kota	95.000.000.500,00	117.999.322.693,00	22.999.322.193,00	124,20
	<b>JUMLAH</b>	<b>159.800.000.500,00</b>	<b>190.483.400.507,00</b>	<b>30.683.400.007,00</b>	<b>119,20</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Pelampauan realisasi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditempuh dengan berbagai upaya antara lain;

- Penyederhanaan proses administrasi kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan melalui percepatan proses pelayanan;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang persyaratan permohonan IMB;
- Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah kotamadya dan menindak tegas pemilik bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.

#### **15). Retribusi Izin Undang-undang Gangguan**

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Undang – undang Gangguan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.415.378.621,00 atau 121,98 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.800.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terdapat pelampauan target penerimaan Rp615.378.621,00 atau 21,98 persen.

Upaya – upaya yang di lakukan sehingga tercapainya target realisasi penerimaan Retribusi Izin Gangguan yaitu, antara lain:

- Peningkatan pendataan tempat usaha secara terus menerus;
- Dilaksanakannya pelayanan keliling ke lokasi padat usaha dengan menggunakan sistem jemput bola;
- Peningkatan pemeriksaan pada tempat-tempat usaha baik yang sudah memiliki izin, maupun yang belum memiliki izin gangguan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

#### **16). Retribusi Izin Trayek**

Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.531.050.000,00 atau 85,06 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.800.000.000,00. Dari realisasi tersebut terlihat bahwa target

realisasi tidak dapat dicapai sebesar Rp268.950.000,00 atau 14,94 persen. Turunnya target ini disebabkan;

- Pengurusan perpanjangan izin trayek dan perizinan trayek baru terjadi penurunan seperti pada pengurusan izin trayek mobil bus besar, bus sedang dan bus kecil, karena tidak adanya penambahan bus,
- Adanya keengganan pengusaha angkutan untuk memperpanjang izin trayek
- Banyaknya kendaraan yang tidak beroperasi sehingga tidak memperpanjang izin trayek.

Walaupun realisasi retribusi ini tidak mencapai target namun upaya telah dilakukan antara lain :

- Pemberian tegoran secara intensif kepada perusahaan angkutan, agar segera memperpanjang izin trayeknya;
- Dilakukannya penertiban dilapangan, bekerjasama dengan instansi terkait.

Disamping penjelasan atas realisasi penerimaan retribusi tersebut di atas, terdapat realisasi penerimaan retribusi baru yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah yang pemungutannya secara efektif dilaksanakan mulai 1 Juli 2006 antara lain :

1. Retribusi UKM dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 Rp9.841.425.000,00, realisasinya baru mencapai Rp2.135.620.500,00 atau 21,70 persen, dan target yang belum dapat dicapai Rp7.705.804.500,00 atau 78,30 persen.
2. Retribusi Izin Pertambangan realisasi penerimaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 Rp1.050.076.268,00 atau 39,53 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp2.656.600.000,00.
3. Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, realisasi penerimaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp6.030.170.000,00 atau 127,99 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp4.711.620.000,00. Dengan demikian terjadi pelampauan target penerimaan sebesar Rp1.318.550.000,00 atau 27,99 persen.

4. Retribusi pelayanan Ketenagakerjaan, realisasi penerimaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp114.190.000,00, sedangkan proyeksinya belum ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2006.

**c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp131.903.430.824,00 atau 99,67 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 Rp132.335.966.854,00. Dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp 432.536.030,00 atau 0.33 persen. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp7.817.545.125.277,53, maka terlihat kontribusi Bagian Laba Usaha Daerah mencapai 1,68 persen. Realisasi penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 4.11.

**TABEL 4.11**

**Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Berlebih (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5(4-3)	6(4:3)
1	Perusahaan Daerah (PD)	30.837.790.764,00	31.404.417.079,00	566.626.315,00	101,84
2	PT. Patungan	98.482.251.090,00	96.667.463.397,00	(1.814.787.693,00)	98,16
3	Badan Pengelola	750.000.000,00	550.000.000,00	(200.000.000,00)	73,33
4	Royalty	-	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00
5	Sewa Asset Daerah	525.000.000,00	143.750.000,00	(381.250.000,00)	27,38
6	Kerja sama Asset Daerah	1.740.925.000,00	2.892.800.348,00	1.151.875.348,00	166,16
<b>JUMLAH</b>		<b>132.335.966.854,00</b>	<b>131.903.430.824,00</b>	<b>(432.536.030,00)</b>	<b>99,67</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing – masing objek dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

**1). Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah ( PD )**

Penerimaan bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp30.837.790.764,00 adapun realisasinya sebesar Rp31.404.417.079,00 atau 101,84 persen. Pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat realisasi bagian laba ini dapat melampaui target sebesar Rp566.626.315,00 atau 1,84 persen. Kontribusi Perusahaan Daerah pada Tahun Anggaran 2006 apabila dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan maka Kontribusinya mencapai 23,80 persen. Rincian lebih lanjut dapat digambarkan pada tabel 4.12 dibawah ini.

**TABEL 4.12**  
**Realisasi Penerimaan Bagian Laba Usaha**  
**Perusahaan Milik Daerah (PD)**  
**Tahun Anggaran 2006**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PDAM Jaya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100,00
2	PD. Dharma Jaya	489.605.000,00	403.099.256,00	(86.505.744,00)	82,33
3	PD. Pasar Jaya	24.018.271.219,00	25.261.877.000,00	1.243.605.781,00	105,18
4	PD. Pemb. Sarana Jaya	1.329.914.545,00	1.329.914.545,00	-	100,00
5	PD. PAL Jaya	2.000.000.000,00	1.409.526.278,00	(590.473.722,00)	70,48
	Jumlah	30.837.790.764,00	31.404.417.079,00	566.626.315,00	101,84

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Selanjutnya penjelasan penerimaan Bagian Laba Usaha Perusahaan Milik Daerah (PD) adalah sebagai berikut :

**a). PD. Air Minum Jaya**

Dalam APBD Tahun Anggaran 2006 PD. Air Minum Jaya diproyeksikan Rp3.000.000.000,00, adapun realisasi setorannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.000.000.000,00. Dengan demikian pada perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 kontribusi PDAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat mencapai target sesuai dengan proyeksi anggaran yang ditetapkan. Kontribusi PAD ini bukan dari bagian laba tetapi merupakan komitmen PDAM Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan "*Financial Projection*" yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan mitra swasta.

**b). PD. Dharma Jaya**

Rencana penerimaan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dari Perusahaan Daerah ini Rp489.605.000,00 adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp403.099.256,00 atau 82,33 persen. Realisasi penerimaan yang diperoleh dari PD. Dharma Jaya tidak mencapai target Rp86.505.744,00 atau 17,67, hal ini terjadi karena kontribusi PD. Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada realisasi pencapaian laba bersih.

**c). PD. Pasar Jaya**

Proyeksi penerimaan bagian laba PD. Pasar Jaya dalam APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp24.018.271.219,00, namun realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp25.261.877.000,00 dengan demikian terlihat adanya pelampauan target penerimaan sebesar Rp1.243.605.781,00 atau 5,18 persen. Penerimaan ini Merupakan Kontribusi PD Pasar Jaya berdasarkan perolehan laba setelah dikurangi pajak untuk Tahun Buku 2005 .

**d). PD. Pembangunan Sarana Jaya**

Penerimaan yang berasal dari bagian laba PD. Pembangunan Sarana Jaya pada Tahun Anggaran 2006 di proyeksikan sebesar Rp1.329.914.545,00, adapun realisasi pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 mencapai

Rp1.329.914.545,00 atau 100 persen. Realisasi ini diperoleh dari taksasi laba setelah pajak tahun buku 2005.

**e). PD. Pengelolaan Air Limbah Jaya**

Penerimaan PD. Pengelolaan Air Limbah Jaya pada Tahun Anggaran 2006 di proyeksikan sebesar Rp2.000.0000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.409.526.278,00. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, kontribusi PD PAL Jaya turun dari target yang ditetapkan Rp590.473.722,00 atau 29,52 persen.

**2). Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga PT. Patungan**

Realisasi bagian laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga (PT. Patungan) pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp96.667.463.397,00 atau 98,16 persen, dari proyeksi yang ditetapkan sebesar Rp98.482.251.090,00,00. Kontribusi Realisasi Penyertaan Modal ini pada Tahun Anggaran 2006 tidak mencapai target Rp1.814.787.693,00 atau 1,84 persen. Kontribusi yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga adalah 73,28 persen dari seluruh pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan ini dari Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT. Patungan) seperti dapat di lihat pada tabel 4.13.

**TABEL 4.13**

**Tabel Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (PT. Patungan) Tahun Anggaran 2006**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Pembangunan Jaya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100
2	PT. Food Station Cipinang	1.500.000.000,00	608.442.720,00	(891.557.280,00)	40,56
3	PT. JIEP	4.800.000.000,00	4.152.707.100,00	(647.292.900,00)	86,51
4	PT. Delta Jakarta	1.778.781.000,00	2.942.809.800,00	1.164.028.800,00	165,44
5	PT. Bumi Grafika Jaya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
6	PT. Pembangunan Jaya Ancol	35.136.000.000,00	35.135.999.939,00	(61,00)	100,00

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
7	PT. Ratax Armada	264.749.000,00	264.769.000,00	20.000,00	100,01
8	PT. Rheem Indonesia	400.000.000,00	550.000.000,00	150.000.000,00	137,50
9	PT. Kawasan Berikat Nusantara	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	(100.000.000,00)	90,91
10	PT. Alumindo Perkasa	47.000.000,00	47.000.000,00	-	100,00
11	P.T. Cemani Toka	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
12	PT. Jaya Nur Sukses	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
13	PT. Asuransi Bangun Askrida	2.246.771.090,00	2.246.771.090,00	-	100,00
14	PT. Jakarta Propertindo	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	100,00
15	PT. Bank DKI Jakarta	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	-	100,00
16	PT. Jakarta Tourisindo	800.000.000,00	800.000.000,00	-	100,00
17	PT. Rumah Sakit Haji	392.700.000,00	-	(392.700.000,00)	0,00
18	PT. RS. Cengkareng	866.250.000,00	10.685.785,00	(855.564.215,00)	1,23
19	PT. RS. Pasar Rebo	500.000.000,00	58.277.963,00	(441.722.037,00)	11,65
	Jumlah	98.482.251.090,00	96.667.463.397,00	(1.814.787.693,00)	98,16

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan realisasi penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (PT Patungan) adalah sebagai berikut :

**a). PT. Pembangunan Jaya**

Pada Tahun Anggaran 2006 penerimaan deviden PT. Pembangunan Jaya diestimasikan sebesar Rp1.500.000.000,00 yang merupakan deviden untuk kinerja tahun buku 2005. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.500.000.000,00 atau mencapai 100 persen. Adapun saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 40 persen

**b). PT. Food Station Cipinang**

Realisasi penerimaan deviden PT. Food Station Cipinang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp608.442.720,00 atau 40,56 persen dari rencana yang ditetapkan Rp1.500.000.000,00. Dengan demikian pada Tahun Anggaran 2006 kontribusi PT.Food Station Cipinang tidak tercapai Rp891.557.280,00 atau 59,44 persen. Realisasi bagian laba yang disetorkan pada Tahun Anggaran 2006 berdasarkan taksasi laba tahun buku 2005.

**c). PT. Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP)**

Penerimaan Deviden PT. JIEP ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006 Rp4.800.000.000,00. Adapun realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp4.152.707.100,00 atau 86,51 persen. Kontribusi PT. JIEP terhadap PAD tidak mencapai target Rp647.292.900,00 atau 13,49 persen. Kontribusi penerimaan PT JIEP berasal dari penyewaan gedung dan penjualan tanah kavling industri.

**d). PT. Delta Jakarta**

Penerimaan deviden PT. Delta Jakarta Tbk Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan Rp1.778.781.000,00,00, realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp2.942.809.800,00 atau 165,44 persen. Realisasi penerimaan deviden yang diperoleh PT. Delta Jakarta dapat melampaui target Rp1.164.028.800,00 atau 65,44 persen. Pelampauan penerimaan ini dapat dicapai karena adanya peningkatan dalam pemasaran produk.

**e). PT. Bumi Grafika Jaya**

Proyeksi penerimaan deviden PT. Bumi Grafika Jaya pada APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp50.000.000,00. Adapun realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar mencapai Rp50.000.000,00 atau 100 persen.

**f). PT. Pembangunan Jaya Ancol**

Dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2006 penerimaan deviden PT. Pembangunan Jaya Ancol diproyeksikan sebesar Rp35.136.000.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Rp35.135.999.939,00 atau 100 persen. Kontribusi PAD dari PT. Pembangunan Jaya Ancol terhadap penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebesar 36,34 persen.

**g). PT. Ratax Armada**

Proyeksi penerimaan deviden PT. Ratax Armada dalam APBD Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan Rp264.749.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp264.769.000,00 atau 100,01 persen. Dengan

demikian kontribusi PT. Ratax Armada terhadap penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebesar 0,27 persen.

**h). PT. Rheem Indonesia**

Proyeksi penerimaan deviden PT. Rheem Indonesia dalam APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan Rp400.000.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp550.000.000,00 atau 137,50 persen. Dengan demikian terdapat pelampauan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp150.000.000,00 atau 37,50 persen. Kontribusi PT. Rheem Indonesia terhadap penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga menjadi 0,57 persen.

**i). PT. Kawasan Berikat Nusantara**

Proyeksi penerimaan deviden PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) pada APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan Rp1.100.000.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp1.000.000.000,00 atau 90,91 persen. Sedangkan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 11,25 persen. Kontribusi PAD dari PT. Kawasan Berikat Nusantara sebesar 1,03 persen terhadap kelompok penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

**j). PT. Alakasa Industrindo Tbk d/h PT Alumindo Perkasa**

Pada APBD Tahun Anggaran 2006 proyeksi penerimaan deviden PT. Alakasa Industrindo Tbk Rp47.000.000,00, terealisasi sebesar Rp47.000.000,00 atau 100 persen. Dengan demikian kontribusi PT. Alakasa Industrindo Tbk sebesar 0,05 persen terhadap kelompok penerimaan penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

**k). PT. Jaya Nur Sukses**

Realisasi penerimaan PT. Jaya Nur Sukses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp100.000.000,00, realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 atau 100 persen.

**l). PT. Asuransi Bangun Askrida.**

Pada APBD Tahun Anggaran 2006 proyeksi penerimaan deviden PT. Asuransi Bangun Askrida Tbk ditetapkan sebesar Rp2.246.771.090,00. Realisasi setoran deviden sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp2.246.771.090,00 atau 100 persen. Sedangkan jumlah penyertaan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 24,80 persen. Kontribusi PT. Asuransi Bangun Askrida terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan jumlah kelompok penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga adalah sebesar 2,32 persen.

**m).PT. Jakarta Propertindo**

Pada APBD Tahun Anggaran 2006 pembagian deviden dari PT. Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diproyeksikan sebesar Rp8.000.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 100 persen. Realisasi penerimaan ini berdasarkan taksasi laba bersih yang diperoleh PT Jakarta Propertindo.

**n). PT. Bank DKI Jakarta**

Proyeksi penerimaan PT. Bank DKI Jakarta pada APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan sebesar Rp39.000.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp39.000.000.000,00 atau 100 persen. Sedangkan realisasi ini disetorkan berdasarkan taksasi laba tahun buku 2005. Apabila realisasi penerimaan yang diperoleh PT Bank DKI ini dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga maka terlihat kontribusi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 40,34 persen.

**o). PT Jakarta Tourisindo**

Bagian laba perusahaan ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006, realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp800.000.000,00 atau 100 persen. Realisasi ini diperoleh berdasarkan taksasi laba tahun buku 2005.

**p). PT Rumah Sakit Haji**

PT Rumah Sakit Haji merupakan perubahan bentuk dari yayasan Rumah Sakit Haji yang ditetapkan berdasarkan Akte Notaris Soetjipto, SH Nomor 28 tanggal 5 Maret 1997 dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004. Perubahan bentuk ini bertujuan untuk menapaki dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif. Sejalan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka dilakukan proses likuidasi pada PT Rumah Sakit Haji yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2006 sehingga perseroan ini berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dengan kondisi tersebut, maka Rumah Sakit Haji sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 belum dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, walaupun pada Tahun Anggaran 2006 sudah ditetapkan proyeksi anggarannya Rp392.700.000,00.

**q). PT Rumah Sakit Cengkareng**

PT Rumah Sakit Cengkareng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004, selanjutnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka dilakukan proses likuidasi pada perseroan ini yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2006 sehingga PT Rumah Sakit Cengkareng berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini membawa dampak tidak tercapainya target yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp866.250.000,00, karena realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 hanya mencapai Rp10.685.785,00 atau 1,23 persen.

**r). PT Rumah Sakit Pasar Rebo**

PT Rumah Sakit Pasar Rebo dibentuk berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2004, perubahan status hukum RSUD Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas adalah dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum, maka dilakukan proses likuidasi terhadap PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2006, sehingga perseroan ini berubah bentuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Dengan adanya perubahan ini, maka Rumah Sakit Pasar Rebo realisasi penerimaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 hanya mencapai Rp58.277.963,00 atau 11,66 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp500.000.000,00.

### 3). Badan Pengelola ( BP )

Pada Tahun Anggaran 2006 Penerimaan Badan Pengelola diproyeksikan sebesar Rp.750.000.000,00, adapun realisasinya sebesar Rp. 550.000.000,00 atau 73,33 persen. Realisasi penerimaan Badan Pengelola pada Tahun Anggaran 2006 tidak mencapai target Rp200.000.000,00 atau 26,67 persen. Adapun kontribusi penerimaan Badan Pengelola kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0.42 persen apabila dibandingkan dengan penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lebih lanjut rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.14.

**TABEL 4.14**

**Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah pada  
Badan Pengelola (BP) Tahun Anggaran 2006**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	BP. THR Lokasari	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
2	BPLIP Pulogadung	600.000.000,00	400.000.000,00	(200.000.000)	66,67
	<b>JUMLAH</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>(200.000.000,00)</b>	<b>73,33</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Selanjutnya penjelasan realisasi penerimaan Badan Pengelola sebagai berikut :

#### a). BP. THR Lokasari

Penerimaan pembagian Laba BP THR Lokasari pada Tahun Anggaran 2006 di proyeksikan sebesar Rp150.000.000,00, adapun realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 atau 100 persen. Realisasi ini didasarkan pada laba penerimaan tahun buku 2005.

#### b). BPLIP Pulogadung

Penerimaan dari pembagian laba BPLIP Pulogadung pada Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp600.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp400.000.000,00 atau 66,67 persen. Dengan demikian target realisasi yang tidak dapat dicapai sebesar Rp200.000.000,00 atau 33,33 persen.

#### 4). Sewa Aset Daerah

Rencana penerimaan Sewa Aset Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2006 ditetapkan sebesar Rp525.000.000,00, adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp143.750.000,00 atau 27,38 persen. Dengan demikian terlihat bahwa realisasi penerimaan yang tidak mencapai target sebesar Rp381.250.000,00 atau 72,62 persen.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Sewa Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 4.17.

**TABEL 4.17**

**Tabel Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah  
pada Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2006**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
2	Eks Komplek Unit Aloca	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	0,00
3	Eks Toko Tastra Jaya	120.000.000,00	-	(120.000.000,00)	0,00
4	PD. Undagi Klender	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	0,00
5	Tanah Kav No.I C2 (PT. Jaya Nur S)	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	0,00
6	Tanah Kav. Blok III A.A No 9 & 10	75.000.000,00	78.750.000,00	3.750.000,00	105,00
7	Eks Toko Pradipta	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>143.750.000,00</b>	<b>(381.250.000,00)</b>	<b>27,38</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

#### 5). Kerja Sama Aset Daerah

Penerimaan Kerja Sama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2006 diproyeksikan sebesar Rp1.740.925.000,00, adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp2.892.800.348,00 atau 166,16 persen. Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi Kerjasama aset ini, dapat melampaui target penerimaan Rp1.151.875.348,00 atau 66,16 persen.

Dengan demikian kontribusi PAD yang diperoleh dari Kerjasama Aset Daerah adalah sebesar 2,19 persen, terhadap Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Rincian lebih lanjut penerimaan Kerjasama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2006 dapat terlihat pada tabel 4.18.

**Tabel 4.18**  
**Realisasi Penerimaan Kerja Sama Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2006**

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	PT. Langgeng Ayam Lestari	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
2	Yayasan Nawami Bhakti	35.000.000,00	39.474.923,00	4.474.923,00	112,79
3	PT. Rama Krishtira Perkasa	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	0,00
4	PT. Dharma Alumas Sakti	76.325.000,00	76.325.425,00	425,00	100,00
5	PT. Jaya Real Property	-	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
6	PT. Rointa Eka Jaya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
7	PT. Wahana Cipta Sejahtera	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	200,00
8	PT. AGB Tuna	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	0,00
9	PT. Pesona Marga M	229.600.000,00	-	(229.600.000,00)	0,00
10	Yayasan Dharma BM.	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	0,00
11	PT.Hotel Cikini Realty	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.740.925.000,00</b>	<b>2.892.800.348,00</b>	<b>1.151.875.348,00</b>	<b>166,16</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Rencana penerimaan Hasil Kerjasama Aset Daerah didasarkan pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati yaitu :

**a). PT Langgeng Ayam Lestari**

Perjanjian kerjasama tahun 2002 tentang Pengelolaan Peralatan (*Emplacement*), Anjungan Terminal, Plaza dan Taman dilingkungan Terminal Blok M wilayah Jakarta Selatan untuk 5 (lima) tahun ketiga dari tanggal 16 September 2002 sampai dengan 16 September 2007.

**b). Yayasan Sapta Nawami Bhakti**

Perjanjian kerjasama tahun 1992 tentang pembangunan dan pengelolaan Rumah Sakit di DKI Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua Yayasan Sapta Nawami Bhakti tanggal 31 Juli 1992.

**c). Pt. Rekatama Krishtira Perkasa**

Perjanjian kerjasama tahun 2003 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyebrangan orang dengan fasilitas pertokoan yang menghubungkan antara bangunan Blok D Pasar Tanah Abang dengan bangunan pertokoan di sisi selatan Jalan Kebon Jati, jembatan penyebrangan dengan fasilitas pertokoan yang menghubungkan Pasar Kebon Jati dengan Bangunan Blok F Pasar Tanah Abang di sisi utara Jalan Kebon Jati dan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang menghubungkan jalan KS Tubun dengan Pasar Kebon Jati Jakarta Pusat.

**d). PT Dharma Alumas Sakti**

Perjanjian kerjasama tahun 1992 tentang Penataan, Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan GOR Mahasiswa Soemantri Brojonegoro, Komplek Seni Budaya dan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail Kuningan Jakarta Selatan.

**e). PT Jaya Real Property**

Perjanjian kerjasama tahun 2001 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Kolam Renang, Lapangan Tenis yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor I Kodya Jakarta Selatan.

**f). PT Rointa Eka Jaya**

Perjanjian kerjasama tahun 2001 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyebrangan Orang beserta Fasilitas Pertokoan yang menghubungkan antara Pusat Grosir Tekstil Pasar Tanah Abang Blok B dengan Pertokoan di sisi timur Jalan H. Fakhruddin Jakarta Pusat.

**g). PT Wahana Cipta Sejahtera**

Perjanjian kerjasama tahun 2004 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyebrangan Multiguna dengan fasilitas Pertokoan dan parkir yang menghubungkan antara pembangunan gedung pertokoan dengan gedung parkir di jalan Letjen. Sutoyo Kavling 76, Jangka waktu perjanjian selama 25 tahun.

**h). PT ABG Tuna**

Perjanjian kerjasama tertanggal 22 Februari 2004 tentang Pembangunan Cold Storage di Muara Angke, jangka waktu selama 20 tahun.

**i). PT Pesona Marga Mandiri**

Pembangunan dan pengelolaan kios perdagangan beserta fasilitasnya di atas sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 3.300m<sup>2</sup> yang terletak di bawah jembatan layang petak baru Pasar Pagi. Jangka waktu perjanjian selama 25 tahun.

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp 753.652.209.375,53 atau 82,55 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp 912.928.004.294,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, target realisasi penerimaan Lain-lain PAD tidak dapat dicapai Rp159.275.794.918,47 atau 17,45 persen.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya mencapai Rp7.817.545.125.277,53 maka terlihat kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD mencapai 9,64 persen.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 4.19.

**TABEL 4.19**  
**Realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah pada**  
**Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	%
	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4 (3-2)	5 (3:2)
▪ Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	54.500.000.000,00	17.873.746.686,00	(36.626.253.314,00)	32,80
▪ Penerimaan Jasa Giro	89.000.000.000,00	117.564.203.545,24	28.564.203.545,24	132,09
▪ Penerimaan Bunga Deposito	268.000.000.000,00	306.345.705.591,00	38.345.705.591,00	114,31
▪ Sumbangan Pihak Ketiga	34.000.000.000,00	31.013.857.601,00	(2.986.142.399,00)	91,22
▪ TPTGR	3.500.000.000,00	7.664.446.748,00	4.164.446.748,00	218,98
▪ Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	-	256.577.441,00	256.577.441,00	0,00
▪ Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	1.331.888.873,00	1.131.888.873,00	665,94
▪ Angsuran Cicilan Rumah	1.920.000.000,00	3.462.526.014,00	1.542.526.014,00	180,34
▪ Rupa-rupa Pendapatan	345.751.558.656,00	259.602.725.876,29	(86.148.832.779,71)	75,08
▪ Sewa	20.500.000.000,00	8.536.531.000,00	(11.963.469.000,00)	41,64
▪ Pengembalian	62.507.200.400,00	-	(62.507.200.400,00)	0,00
▪ Kontra Pos	1.213.450.000,00	-	(1.213.450.000,00)	0,00
▪ Denda Administrasi/Kenaikan Pajak	31.835.795.238,00	-	(31.835.795.238,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>912.928.004.294,00</b>	<b>753.652.209.375,53</b>	<b>(159.275.794.918,47)</b>	<b>82,55</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, antara lain sebagai berikut:

#### 1). Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

Realisasi hasil Penjualan Barang Milik Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp17.873.746.686,00 atau 32,80 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp54.500.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasinya tidak mencapai target Rp36.626.253.314,00 atau 67,20 persen.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah dalam Tahun Anggaran 2006 diperoleh dari upaya antara lain :

- Penjualan jalan atau sarana, sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- Penjualan inventaris/barang bekas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang usia pemakaiannya bertambah, karena telah dihapuskan seperti kendaraan bermotor, bangunan gedung dan inventaris kantor.
- Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 4.20

**TABEL 4.20**

**Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah  
Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1.	Penjualan Jalan/Sarana	43.500.000.000,00	11.041.418.020,00	(32.458.581.980,00)	25,38
2.	Penjualan Inventaris/Barang Bekas	6.000.000.000,00	3.832.898.416,00	(2.167.101.584,00)	63,88
3.	Penjualan Brandgang	5.000.000.000,00	2.999.430.250,00	(2.000.569.750,00)	59,99
	<b>Jumlah</b>	<b>54.500.000.000,00</b>	<b>17.873.746.686,00</b>	<b>(36.626.253.314,00)</b>	<b>32,80</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

**2). Jasa Giro**

Realisasi penerimaan Jasa Giro sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp117.564.203.545,24 atau 132,09 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp89.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat adanya pelampauan target penerimaan Rp 28.564.203.545.,24 atau 32,09 persen.

Pelampauan realisasi penerimaan tersebut bersumber dari :

- Hasil optimalisasi penempatan dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang disimpan di Bank Pemerintah yaitu pada Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BRI dan , Bank BNI;
- Jasa Giro yang berasal dari Giro Pemerintah Daerah (KPKD) dan Jasa Giro para Pemegang Kas;

### **3). Bunga Deposito**

Bunga Deposito sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006, realisasinya mencapai Rp306.345.705.591,00 atau 114,31 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp268.000.000.000,00. Sehingga pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terjadi pelampauan penerimaan Rp38.345.705.591,00 atau 14,31 persen.

Adapun realisasi penerimaan Bunga Deposito bersumber dari penempatan atas dana yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang disimpan pada bank-bank pemerintah seperti Bank DKI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI.

### **4). Angsuran Cicilan Rumah**

Realisasi penerimaan Angsuran Cicilan Rumah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.462.526.014,00 atau 180,34 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.920.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terjadi pelampauan target penerimaan Rp1.542.526.014,00 atau 80,34 persen.

Pencapaian target realisasi penerimaan Angsuran Cicilan Rumah diupayakan dari:

- Cicilan uang muka rumah susun Rp389.642.909,00;
- Sewa beli rumah susun Rp3.051.905.605,00;
- Sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli Rp20.977.500,00.

### **5). Rupa-rupa Pendapatan**

Realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp259.602.725.876,29 atau 75,08 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp345.751.558.656,00. Dengan demikian pada Perhitungan

APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan tidak mencapai target sebesar Rp86.148.832.779,71 atau 24,92 persen.

Selanjutnya realisasi penerimaan Rupa-rupa Pendapatan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 4.21.

**TABEL 4.21**

**Realisasi Penerimaan Rupa-Rupa Pendapatan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
1	Dinas Tenaga Kerja/Premi Asuransi	2.500.000.000,00	2.724.009.827,00	224.009.827,00	108,96
2	Dinas Pertambangan	-	420.383.600,00	420.383.600,00	0,00
3	TM Ragunan	379.010.000,00	358.648.501,00	(20.361.499,00)	94,63
4	Jaminan untuk Pemasangan Reklame	-	1.096.640.676,00	1.096.640.676,00	0,00
5	Hasil Lelang Titik Reklame	40.000.000.000,00	21.792.365.121,00	(18.207.634.879,00)	54,48
6	RSUD Budhi Asih	6.434.100.000,00	7.035.375.000,00	601.275.000,00	109,35
7	RSUD Koja	375.327.000,00	-	(375.327.000,00)	0,00
8	RSUD Tarakan	581.793.000,00	-	(581.793.000,00)	0,00
9	RSUD Duren Sawit	35.000.000,00	12.569.775,00	(22.430.225,00)	35,91
11	Puskesmas	18.381.130.000,00	13.890.364.692,00	(4.490.765.308,00)	75,57
12	Biaya Penutupan galian	1.000.000.000,00	2.098.724.646,00	1.098.724.646,00	209,87
13	Sumbangan Perum Jasa Raharja	2.500.000.000,00	5.047.288.450,00	2.547.288.450,00	201,89
14	Fasos/Fasum	9.204.537.000,00	6.481.872.480,00	(2.722.664.520,00)	70,42
15	Biaya penyelesaian desimal	-	1,15	1,15	0,00
16	Eks. Kanwil Deperindang	3.150.000.000,00	2.441.885.423,00	(708.114.577,00)	77,52
17	Kompensasi Pemb. Menara Telekomunikasi	7.200.000.000,00	90.405.000,00	(7.109.595.000,00)	1,26
18	Penerimaan Pembayaran Air PDAM Rusunawa	160.000.000,00	446.672.183,00	286.672.183,00	279,17
19	Eks. Kanwil Dephub	2.441.810.000,00	602.473.200,00	(1.839.336.800,00)	24,67
20	Eks. Kanwil Depnaker	-	500.000,00	500.000,00	0,00
21	BP Trans Jakarta (Bus Way)	205.000.000.000,00	130.514.012.500,00	(74.485.987.500,00)	63,67
22	PT. Nakia Dwipardha	-	446.919.320,00	446.919.320,00	0,00
23	PT. Suwar Andhika Wahana Ujindo	-	87.744.880,00	87.744.880,00	0,00
24	Hibah BPPN	46.408.851.656,00	46.408.851.656,85	0,85	100,00
25	Jaminan Pek. Dinas PJU & SJU	-	15.344.400,00	15.344.400,00	0,00
26	Jaminan Penawaran	-	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
27	Jaminan Pelaksanaan	-	8.718.050,00	8.718.050,00	0,00
28	Penyetoran Kembali	-	17.566.456.494,80	17.566.456.494,80	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>345.751.558.656,00</b>	<b>259.602.725.876,29</b>	<b>(86.148.832.779,71)</b>	<b>75,08</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

## **2. Bagian Dana Perimbangan**

Pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 bagian penerimaan daerah dari Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang terdiri dari Penerimaan SDA sektor Perikanan, SDA sektor Minyak Bumi dan SDA sektor Gas Alam, serta Dana Alokasi Umum.

Dana Perimbangan merupakan penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.

Realisasi penerimaan daerah atas Dana Perimbangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp6.520.073.375.823,00,00 atau 97,88 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp6.661.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp140.926.624.177,00 atau 2,12 persen.

Apabila realisasi penerimaan Dana Perimbangan ini dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah yang jumlahnya mencapai Rp14.337.618.501.100,53 maka kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah mencapai 45,47 persen.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan tersebut bersumber dari :

- Bagi Hasil Pajak realisasinya mencapai Rp5.533.851.713.166,00 atau 96,01 persen;
- Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya mencapai Rp213.197.562.657,00 atau 170,56 persen;
- Dana Alokasi Umum realisasinya mencapai Rp773.024.100.000,00 atau 100,13 persen.

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 digambarkan pada tabel 4.22.

**TABEL 4.22**  
**Realisasi pendapatan Dana Perimbangan pada Perhitungan APBD**  
**Tahun Anggaran 2006**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2006		Bertambah (Berkurang)	Δ %
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4:3)
<b>I.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>5.764.000.000.000,00</b>	<b>5.533.851.713.166,00</b>	<b>(230.148.286.834,00)</b>	<b>96,01</b>
	▪ Pajak Bumi dan Bangunan	1.186.857.793.132,00	1.271.065.048.731,00	84.207.255.599,00	107,09
	▪ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.337.972.437.358,00	966.192.141.680,00	(371.780.295.678,00)	72,21
	▪ Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.064.000.000.000,00	3.072.665.317.903,00	8.665.317.903,00	100,28
	▪ Pendapatan Biaya Pemungutan PBB	101.497.756.662,00	115.705.707.455,00	14.207.950.793,00	114,00
	▪ Penerimaan PBB bagi Pemerintah Pusat yang diserahkan kembali	11.644.450.206,00	102.092.977.947,00	90.448.527.741,00	876,75
	▪ Penerimaan Insentif PBB bagi Pempus. u/ DATI II	50.000.000.000,00	-	(50.000.000.000,00)	0,00
	▪ Penerimaan BPHTB bagi Pempus. Yg diserahkan kembali	12.027.562.642,00	6.130.519.450,00	(5.897.043.192,00)	50,97
<b>II.</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>125.000.000.000,00</b>	<b>213.197.562.657,00</b>	<b>88.197.562.657</b>	<b>170,56</b>
	▪ Pendapatan SDA Sektor Perikanan	1.900.000.000,00	1.805.279.040,00	(94.720.960,00)	95,01
	▪ Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi	114.600.000.000,00	195.408.200.840,00	80.808.200.840,00	170,51
	▪ Pendapatan SDA Sektor Gas Alam	8.500.000.000	15.984.082.777,00	7.484.082.777,00	188,05
<b>III.</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>772.000.000.000,00</b>	<b>773.024.100.000,00</b>	<b>1.024.100.000,00</b>	<b>100,13</b>
	• Dana Pembangunan Daerah	-	-	-	0,00
	• Dana Rutin Daerah	772.000.000.000,00	773.024.100.000,00	1.024.100.000,00	103,13
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.661.000.000.000,00</b>	<b>6.520.073.375.823,00</b>	<b>(140.926.624.177,00)</b>	<b>97,88</b>

Sumber : Biro Keuangan Pemerintah Prop. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Dana Perimbangan, pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

### **1). Bagi Hasil Pajak**

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp5.533.851.713.166,00 atau 96,01 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp5.764.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 terlihat target yang tidak dapat dicapai Rp230.148.286.834,00,00 atau 3,99 persen.

Apabila realisasi Bagi Hasil Pajak dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan, maka kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan sangat signifikan yaitu mencapai 84,87 persen. Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

#### **a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp1.271.065.048.731,00 atau 107,09 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.186.857.793.132,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terjadi pelampauan target penerimaan Rp84.207.255.599,00 atau 7,09 persen.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditempuh berbagai upaya yang intensif, antara lain :

- Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait;
- Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
- Pemutakhiran data objek dan subjek PBB;
- Peningkatan sistem pelayanan pembayaran melalui **“payment on line system”** di beberapa bank, sebagai tempat pembayaran PBB di 5 (lima) wilayah Kotamadya.
- Pemberian hadiah dan penghargaan kepada RT/RW yang berprestasi dalam membantu pelaksanaan pemungutan PBB.

#### **b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bagian daerah dari penerimaan BPHTB sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 realisasinya mencapai Rp966.192.141.680,00 atau 72,21 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp1.337.972.437.358,00,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, target realisasi yang tidak dapat dicapai sebesar Rp371.780.295.678,00 atau 27,79 persen.

Walaupun Realisasi penerimaan BPHTB tersebut tidak mencapai target, langkah dan upaya yang dilakukan yaitu: peningkatan koordinasi dan kerja sama pengawasan terhadap setiap transaksi jual beli tanah dan bangunan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pelayanan PBB, dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara; serta pemberian penghargaan dan hadiah kepada PPAT yang berprestasi dalam pemungutan BPHTB di 5 (lima) wilayah Kotamadya.

### **c. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH)**

Bagian daerah Provinsi DKI Jakarta dari penerimaan PPh realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp3.072.665.317.903,00 atau 100,28 persen, dari proyeksi yang ditetapkan Rp3.064.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, terdapat pelampauan target penerimaan PPh mencapai Rp8.665.317.903,00 atau 0,28 persen.

Walaupun PPh ini merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat, namun tetap diupayakan peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PPh, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan upaya tersebut telah diterbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2002 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-21/Pj/2004 tentang Koordinasi Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan Jakarta ditunjuk sebagai Pilot Proyek di seluruh Indonesia.

## **2). Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)**

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp213.197.562.657,00 atau 170,56 persen dari proyeksi yang ditetapkan Rp125.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA terdapat pelampauan target penerimaan Rp88.197.562.657,00 atau 70,56 persen.

Realisasi Penerimaan Bagian Daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA bersumber dari :

- Penerimaan SDA Sektor Perikanan realisasinya Rp1.805.279.040,00
- Pendapatan SDA Sektor Minyak Bumi realisasinya Rp195.408.200.840,00
- Penerimaan SDA Sektor Gas Alam realisasinya Rp15.984.082.777,00

### **3). Dana Alokasi Umum (DAU)**

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 mencapai Rp773.024.100.000,00 atau 100,13 persen, dari proyeksi yang telah ditetapkan Rp772.000.000.000,00. Dengan demikian pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006, pelampauan target penerimaannya adalah sebesar Rp1.024.100.000,00 atau 0,13 persen. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan, maka terlihat kontribusi DAU terhadap Dana Perimbangan mencapai 11,85 persen. Realisasi penerimaan DAU ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2005 tanggal 12 Desember 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006.

## **B. BELANJA DAERAH**

Dalam penyusunan APBD 2006 belanja daerah dikelompokkan menurut struktur program (bidang pembangunan, fungsi dan program) dan struktur belanja (bagian, kelompok dan jenis belanja). Oleh karena itu, dalam perhitungan APBD 2006 tentunya harus menggunakan struktur yang sama.

### **1. Belanja Daerah Menurut Bidang Pembangunan**

Pengelompokkan struktur program terbagi kedalam 8 bidang pembangunan dan ke delapan bidang tersebut terdiri dari 32 fungsi dan 107 program. Setiap fungsi dan program akan ditangani oleh satu atau beberapa unit kerja, sehingga dalam mengukur indikator kinerja unit kerja yang bersangkutan akan lebih mudah dilaksanakan.

**TABEL 4.23**  
**Realisasi Belanja Daerah menurut Bidang Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2006**

No.	BIDANG PEMBANGUNAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Hukum Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa	677.167.891.197,00	608.872.224.528,00	89,91
2	Pemerintahan	7.351.252.815.255,00	6.320.330.879.395,80	85,97
3	Ekonomi	717.292.963.178,00	605.791.742.684,00	84,46
4	Pendidikan dan Kesehatan	2.420.432.077.998,00	2.162.842.522.726,00	89,35
5	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	209.157.458.496,00	184.756.136.929,00	88,33
6	Sosial dan Budaya	795.308.923.007,00	645.228.382.653,00	81,13
7	Sumberdaya Alam dan Lingk.Hidup	1.197.593.409.376,00	953.700.842.637,00	79,63
8	Sarana dan Prasarana Kota	4.804.145.924.013,00	3.680.055.064.653	76,60
	<b>Jumlah</b>	<b>18.172.351.462.520,00</b>	<b>15.161.577.796.205,80</b>	<b>83,43</b>

**a. Bidang Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran Rp677.167.891.197,00 untuk membiayai fungsi hukum, ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana, serta kesatuan bangsa. Sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah direalisasikan Rp608.872.224.528,00 dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp68.295.666.669,00.

**1) Fungsi Hukum**

Fungsi ini dimaksudkan untuk menyusun, menata, mengembangkan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat

terhadap hukum dan aparat penegak hukum, dengan melaksanakan 3 program dan 6 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Daerah, diarahkan untuk mengkaji produk-produk hukum yang sudah ada serta menata kembali produk-produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang serta menyusun peraturan perundang-undangan baru (Raperda) sejalan dengan era otonomi daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain penyusunan Raperda dan penyempurnaan Perda serta produk hukum lainnya, dan menyusun peta kebutuhan produk hukum.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersusunnya 6 Raperda baru dan penyempurnaan 6 perda, serta penyusunan 5 peraturan gubernur. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Peningkatan Kesadaran Hukum, diarahkan untuk mensosialisasikan produk-produk hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah, menengah dan atas, pelajar, mahasiswa serta aparat agar dapat memahami hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat dan memenuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain sosialisasi produk hukum melalui multimedia dan tatap muka serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, kampanye kesadaran hukum dan peningkatan disiplin aparat penegak hukum.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terselenggaranya gema hukum ibukota Jakarta, penerangan hukum melalui media elektronik dan cetak, penyuluhan hukum terpadu, pelaksanaan talkshow interaktif di radio, pembinaan keluarga sadar hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pengembangan serta updating situs informasi Biro Hukum. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum, diarahkan untuk tersusunnya mekanisme yang lebih baik dalam pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum, meningkatnya supremasi hukum, serta menurunnya jumlah tindak kekerasan dan angka kriminalitas. Dan dalam peningkatan pelayanan dan penegakan hukum telah dilaksanakan kegiatan antara lain memberikan bantuan hukum pada semua unsur pemda dan masyarakat dengan menggunakan tenaga-tenaga hukum profesional.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain penyelesaian masalah sengketa pertanahan dan pengurusan perkara perdata, pidana dan TUN. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

## **2) Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari serta meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana yang sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan melaksanakan 4 program dan 7 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban, diarahkan untuk mengurangi anarkisme massa, tawuran dan pelanggaran HAM antar kelompok masyarakat, meningkatnya sikap budaya dan perilaku toleran antar berbagai suku, agama, ras dan golongan, meningkatnya sikap anti diskriminasi dan anti kekerasan, menurunnya pelanggaran lalu lintas, tingkat kriminalitas dan meningkatnya rasio jumlah petugas kamtibmas terhadap jumlah penduduk dan meningkatkan komunikasi dengan para penegak hukum, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain penertiban gangguan

masyarakat, pengamanan jalur busway, serta peningkatan kelembagaan Dinas Tramtib dan Linmas.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain, terlaksananya kegiatan penertiban PMKS, penurunan tingkat kriminalitas serta meningkatnya kemampuan dan keahlian aparat Dinas Tramtib dan Linmas. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam tramtibmas dan penanggulangan bencana, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal kamtibmas, meningkatnya rasa aman masyarakat dalam hal kamtibmas, serta meningkatnya rasa aman masyarakat dalam melakukan kegiatan, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Tramtib dan penanggulangan bencana.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersosialisasinya penanggulangan bencana, dan terkendalinya penyaluran bantuan bagi kebutuhan masyarakat. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c) Program peningkatan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran, diarahkan untuk menangani dan menanggulangi bencana dan terantisipasinya gangguan kamtibmas dan bencana, serta tersedianya peralatan Dinas Kebakaran, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain monitoring pengawasan gangguan kamtibmas, pengadaan sarana dan prasarana Dinas Kebakaran, pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan website, peningkatan sistem informasi penanggulangan kebakaran, dan penyusunan draft perda pengganti perda 3/1992.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran, meningkatnya penanganan crisis center dalam penanggulangan bencana dan gejolak massa. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- d) Program pengembangan sarana prasarana dan penanggulangan bencana, diarahkan untuk tersedianya peralatan kamtib dan penanggulangan bencana sesuai dengan perkembangan teknologi, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan sarana dan prasarana dan penanggulangan bencana serta pengadaan sarana dan prasarana tramtib.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersedianya truk boks modifikasi, tersedianya sarana call center pada ruang crisis center dan pengadaan CCTV pada ruang publik. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

### **3) Fungsi Kesatuan Bangsa**

Fungsi ini dimaksudkan untuk membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokrasi dan berwawasan kebangsaan, serta membina hubungan antar golongan, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dengan melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program pemantapan integrasi bangsa, demokrasi dan HAM, diarahkan untuk terciptanya integrasi bangsa yang kokoh, berkurangnya perkelahian/perselisihan yang bersifat partisan dan primordial serta meningkatnya peran integrasi pemerintah dan lembaga independen dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kesadaran demokrasi dan HAM aparat serta masyarakat Jakarta, peningkatan kewaspadaan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), peningkatan kerukunan dan pembauran kehidupan masyarakat Jakarta, serta peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat Jakarta.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terlaksananya aktualisasi nilai kewaspadaan nasional, koordinasi dan pelaksanaan aktualisasi ketahanan nasional dan bela negara, serta sosialisasi undang-undang politik bagi organisasi masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program pengembangan hubungan antar lembaga kemasyarakatan, diarahkan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang nyaman dan kondusif, terwujudnya kesamaan persepsi terhadap kejadian-kejadian di masyarakat dan terhadap hasil pembangunan, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka penerapan kebijakan bidang politik, dan menyelesaikan masalah-masalah politik, peningkatan hubungan antar lembaga kemasyarakatan, penyusunan dan penetapan prosedur serta pelaksanaan operasional.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terlaksananya dialogis antar DPRD, eksekutif, dan unsur civitas akademika, dialog interaktif antar eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat, pelatihan manajemen bagi pengurus Parpol, aktualisasi kemitraan ormas dan LSM, serta meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan ormas dan orsospol. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

## **b. Bidang Pemerintahan**

Pada tahun anggaran 2006 Bidang Pemerintahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.351.252.815.255,00 Yang digunakan untuk membiayai fungsi Pemerintahan Umum dan fungsi Aparatur. Sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang pemerintahan telah direalisasikan Rp6.320.330.879.395,80. Dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp1.030.921.935.859,20

### **1) Fungsi Pemerintahan Umum**

Fungsi Pemerintahan Umum dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah dan sistim pemerintahan daerah dengan melaksanakan 9 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Otonomi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah yang

menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain (a) pengembangan dan penataan administrasi pemerintahan kotamadya/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan; (b) perumusan Kebijakan dan pemantapan pelaksanaan Otda; (c) koordinasi dan fasilitasi Pelimpahan Kewenangan; (d) Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah; (e) Peningkatan Manajemen Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan Provinsi DKI Jakarta.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Provinsi, diarahkan untuk mewujudkan terciptanya administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang tertib dan dinamis, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain (a) Sosialisasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan; Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah; Perumusan dan Fasilitasi Kebijakan Pemerintahan; Pemberdayaan Perangkat Wilayah.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c) Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat, diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat yang tertib dan dinamis, melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien ditingkat wilayah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Pelayanan Hukum dan Pengembangan Organisasi Tata Laksana Wilayah Jakarta Pusat; Peningkatan Administrasi Barang Daerah Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Administrasi Sarana Perkotaan Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat.; Peningkatan Administrasi Kepegawaian Wilayah Jakarta Pusat; Peningkatan Administrasi Perekonomian Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Administrasi Keuangan Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Administrasi Kesmas

Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Pengamanan Pasca Penertiban Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Administrasi Kehumasan dan Keprotokolan Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat; Peningkatan Pengamanan Pasca Penertiban Wilayah Kodya Jakarta Pusat; Dedicated Ijo Royo-Royo.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- d) Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kotamadya Jakarta Utara yang tertib dan dinamis, melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien di tingkat wilayah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Utara; Peningkatan Administrasi Kepegawaian Wilayah Jakarta Utara; Peningkatan Pelayanan Hukum dan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Wilayah Jakarta Utara; Peningkatan Administrasi Kesmas Wilayah Jakarta Utara; Peningkatan Administrasi Perekonomian Wilayah Jakarta Utara; Peningkatan Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Utara; Peningkatan Administrasi Umum dan Kerumah Tanggaan Wilayah Jakarta Utara; Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Bus Way Wilayah Jakarta Utara; Peningkatan Administrasi Barang Daerah Wilayah Jakarta Utara; Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan Wilayah Jakarta Utara; Peningkatan Pengamanan Pasca Penertiban Wilayah Kodya Jakarta Utara; Operasional Badan Pengendali Pembangunan Oleh Pengembang Wilayah Kotamadya Jakarta Utara; Operasional Badan Pelaksana Reklamasi Pantura.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- e) Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat yang tertib dan dinamis, melalui peningkatan pelayanan publik yang efisien ditingkat wilayah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Administrasi Keuangan Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Administrasi Kepegawaian Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Administrasi

Umum dan Kerumahtanggaan Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Barat; Peningkatan Pelayanan Hukum dan Pengembangan Organisasi Tatalaksana Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Administrasi Perekonomian Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Administrasi Sarana Perkotaan Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Administrasi Kesmas Wilayah Jakarta Barat; Peningkatan Pengamanan Pasca Penertiban Wilayah Kodya Jakarta Barat; Operasional Badan Pengelola Sentra Primer Baru Barat.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- f) Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan yang tertib dan dinamis, melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien ditingkat wilayah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan; ; Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Wilayah Jakarta Selatan; Peningkatan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kotamadya Jakarta Selatan; Peningkatan Kegiatan Pelayanan Hukum dan Pengembangan Organisasi Tatalaksana Kotamadya Jakarta Selatan; Peningkatan Administrasi Kepegawaian Kotamadya Jakarta Selatan; Peningkatan Administrasi Sarana Perkotaan Kotamadya Jakarta Selatan; Peningkatan Administrasi Perekonomian Kotamadya Jakarta Selatan; Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan; Peningkatan Administrasi Kesmas Kotamadya Jakarta Selatan; Peningkatan Pengamanan Pasca Penertiban Wilayah Kodya Jakarta Selatan.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- g) Program Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kotamadya Jakarta Timur yang tertib dan dinamis, melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien ditingkat wilayah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain

Peningkatan Administrasi Perekonomian Kotamadya Jakarta Timur; Peningkatan Administrasi Umum Kotamadya Jakarta Timur; Peningkatan Administrasi Keuangan Kotamadya Jakarta Timur; Peningkatan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkotaan Kotamadya Jakarta Timur; Peningkatan Administrasi Wilayah Kotamadya Jakarta Timur; Peningkatan Administrasi Kesmas Kotamadya Jakarta Timur; Peningkatan Administrasi Humas Kotamadya Jakarta Timur; Pembinaan dan Penanganan Hukum serta Pengembangan Ortala Kotamadya Jakarta Timur; Peningkatan Administrasi Kepegawaian Kotamadya Jakarta timur; Peningkatan Administrasi Barang Daerah Kotamadya; Peningkatan Pengamanan Pasca Penertiban Wilayah Kodya Jakarta Timur; Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sentra Primer Baru Timur.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100persen.

- h) Program Pengembangan Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang tertib dan dinamis, melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien ditingkat wilayah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pengembangan Pemerintahan Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu; Peningkatan Administrasi Kepegawaian Kepulauan Seribu; Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman Kepulauan Seribu; Rehabilitasi Kantor Lurah; Peningkatan Produksi dan Perlindungan Tanaman; Peningkatan Informasi dan Kemitraan Lingkungan hidup; Peningkatan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan dan Kepedulian Masyarakat Jakarta; Peningkatan sarana perlengkapan dan kerumahtangaan Kepulauan Seribu; Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka memperkuat Ketahanan Jakarta; **PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KEPULAUAN SERIBU**; Pemberdayaan UKM dan Koperasi Di Kepulauan Seribu; Peningkatan Industri dan Perdagangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; Peningkatan dan Pengembangan Kehumasan; Pengembangan Pelayanan Prima;.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100persen.

- i) Program Penataan Adm Pertanahan telah dilaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, peningkatan adm pertanahan di DKI Jakarta., serta penyuluhan dan pembinaan masyarakat di bidang pertanahan.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain: Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi peraturan pengelolaan tanah untuk keperluan pembangunan bagi kepentingan umum di lima wilayah kotamadya, terlaksananya penyusunan data base tanah-tanah bermasalah dilima wilayah, terlaksananya pengendalian, monitoring, pelaporan dan dokumentasi pengadaan tanah di lima wilayah kotamadya, terlaksananya diklat penggunaan GIS dan Website, terlaksananya inventarisasi aset pemerintahan pusat di provinsi DKI Jakarta.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

## **2) Fungsi Aparatur**

Fungsi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan administrasi kepegawaian, kemampuan dan ketrampilan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menambah/ menata struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif melalui program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan SDM Aparatur, diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, terwujudnya aparatur yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Pegawai; Pembinaan rohani pegawai, pensiunan dan keluarga.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas aparatur pemerintah melalui peningkatan

berbagai pendidikan pegawai dan meningkatkan keterampilan, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pengembangan dan Pengelolaan SI Kepegawaian; Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; Penempatan dan Pendayagunaan Pegawai; Pengelolaan Kesra Pegawai; Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan aparatur, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain diklat kepemimpinan; diklat teknis kebahasaan; diklat teknis manajemen; diklat teknis administrasi; diklat fungsional; diklat teknis substantif; tugas belajar.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- d) Program Penataan` Organisasi dan Ketatalaksanaan, diarahkan untuk merestrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pembinaan Administrasi Kelembagaan; Pembinaan Administrasi Ketatalaksanaan; Analisa Jabatan; Pengolahan Data.

Adapun dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

### **3) Fungsi Perencanaan dan Pengawasan**

Fungsi Perencanaan dan Pengawasan dimaksudkan untuk menyusun sistem perencanaan dan pengawasan daerah yang komprehensif, mampu merumuskan pikiran seluruh elemen masyarakat (stakeholders) dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan peran penelitian dan pengembangan. Pada Tahun Anggaran 2006, Fungsi Perencanaan dan Pengawasan mendapat alokasi Belanja untuk melaksanakan Program Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Peningkatan Pengawasan Fungsional, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah. Pencapaian fungsi

perencanaan dan pengawasan (1) tersusunnya pedoman perencanaan master plan dan rencana aksi fungsi-fungsi strategi bidang Tatapraja dan Aparatur, Kesmas, Ekonomi dan SPKLH. (2) Tersusunnya draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 dan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) Tersusunnya laporan monitoring dan pengendalian daerah; (4) Tersedianya laporan hasil pengawasan/pemeriksaan reguler, penanganan kasus KKN dan evaluasi tindak lanjut.

Adapun penjelasan masing-masing program sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana, diarahkan agar tersusunnya perencanaan daerah yang mampu menampung hasil pemikiran masyarakat, meningkatnya rasio realisasi terhadap perencanaan daerah, meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan daerah.

Program ini mendapat alokasi anggaran dengan kegiatan antara lain : Penyusunan Master plan dan rencana Aksi Fungsi-fungsi Strategis Bidang Ekonomi, Bidang Kesmas, Bidang Aparatur dan Bidang SPKLH, Pengadaan Sarana dan Prasarana Bapeda, Penyusunan Rencana Tahunan, Penyusunan APBD, Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain, Terciptanya Administrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang tertip dan Dinamis, Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan, Tersusunnya perencanaan daerah yang mampu menampung hasil pemikiran masyarakat, dan meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan daerah. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 %.

- b) Program Penelitian dan Pengembangan, dimaksudkan agar perencanaan pembangunan akan lebih terarah dengan berdasar pada hasil penelitian dan pengembangan, serta guna meningkatkan kemudahan pencairan referensi bagi penelitian dan pengembangan.

Pada tahun anggaran 2006 program ini telah melaksanakan kegiatan antara lain :

Penelitian dan pengembangan, peningkatan kualitas penelitian, penunjang kebijakan serta pembenahan arsip Bapeda.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain, Tersusunnya perencanaan pembangunan yang lebih terarah didasari oleh penelitian dan pengembangan, Meningkatnya kemudahan pencarian referensi bagi penelitian dan pengembangan. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 %.

- c) Program Peningkatan Pengawasan Fungsional, dimaksudkan agar terciptanya mekanisme chek and balance dalam pelaksanaan pemerintahan, meningkatnya penyelesaian kasus KKN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya jumlah unit kerja atau dinas yang melaksanakan akuntabilitas kinerjanya.

Program ini mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan antara lain :

Peningkatan Pengawasan Reguler/Pemeriksaan Reguler, Peningkatan Pembinaan/Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Unit satuan Kerja di Lingkungan Prop. DKI Jakarta, peningkatan Pengawasan dan Penanganan Kasus KKN, Pengembangan SDM/pelaksanaan Diklat Fungsional Auditor.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : terciptanya mekanisme chek and balances dalam pelaksanaan pemerintahan, tersedianya laporan hasil pengawasan/pemeriksaan reguler dan evaluasi tindak lanjutnya serta disampaikan ke DPRD sewaktu-waktu diminta, dan tersedianya data hasil-hasil penanganan kasus KKN.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

- d) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dimaksudkan agar terjadinya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara kota dan daerah didalam dan luar negeri, terjadinya penukaran informasi pengalaman-pengalaman daerah-daerah lain dalam melaksanakan pembangunan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain: peningkatan kerjasama teknik dan jasa ekonomi; peningkatan kerjasama antar daerah dalam negeri serta lembaga; peningkatan program kerjasama antar lembaga dan organisasi internasional; peningkatan program kerjasama sister city dan peningkatan kerjasama antar

daerah dalam negeri satu lembaga. Adapun hasil yang dicapai antara lain : terlaksananya fasilitasi terhadap penawaran pelatihan pegawai ke luar negeri; terlaksananya fasilitasi dalam rangka kerjasama tehnik dan jasa ekonomi; terlaksananya koordinasi partisipasi kota Jakarta dalam event-event Internasional seperti antara lain : advent the 6 th planery meeting of ANMC 21 tahun 2006; Asia Fasifik City Summit UNMQI Council dan Executive Bureuw UCLG World; terlaksananya koordinasi pemberangkatan ke kota-kota sister city; terlaksananya penerimaan delegasi kota-kota sister city dan calon sister city; terlaksananya rakoor Gubernur MPU tahun 2006 di Jakarta. Sementara kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada program ini selama tahun 2006 adalah pengukuhan sister city Jakarta – Kyui, Jakarta Maputo, Jakarta Kwazuw Natal dan Jakarta Pyongyang dengan alasan pimpinan dari masing-masing tersebut belum dapat hadir ke Jakarta dan pada tahun 2007 tetap diupayakan terlaksananya pengukuhan kerjasama sister city dimaksud.

#### **4) Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan penataan, pengelolaan perbendaharaan, administrasi keuangan daerah untuk mendukung aktifitas ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dengan dukungan kemajuan teknologi serta mengembangkan sistem administrasi, pengelolaan aset-aset daerah untuk menjaga, memelihara dan melindungi semua kekayaan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2006 fungsi keuangan daerah mendapat alokasi belanja yang dipergunakan untuk membiayai Program Peningkatan Perbendaharaan Daerah, Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah, Program Peningkatan Penerimaan Daerah, Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah. Pencapaian fungsi ini anatara lain (1) Tersusunnya draft Raperda fasos/fasum; (2) terselenggaranya operasional sistem informasi manajemen aset (SIMA-GIS); (3) Tersusunnya kajian sewa lahan dan nilai strategis reklame 2 wilayah Provinsi DKI Jakarta; (4) Terselenggaranya sosialisasi aset daerah; (5) Terselenggaranya persertifikatan tanah aset Pemda Dki Jakarta; (6) Terlaksananya sosialisasi perpajakan melalui media elektronik; (7)

Pembentukan info rinci 200.000 objek pajak; (8) Tersedianya data hasil converssing oleh 56KP/KPP; (9) tersedianya sarana pemungutan pajak daerah; (10) Terlaksananya pembayaran penerimaan dan pengeluaran daerah; (11) Tersusunnya dokumen perubahan APBD, Tim Anggaran dan penyusunan dokumen APBD tahun 2007

Adapun penjelasan dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Perbendaharaan Daerah, bertujuan untuk Terwujudnya pelayanan yang mudah dan tepat sasaran.

Pada program ini dialokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

Peningkatan Kegiatan Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah, Peningkatan Pengolahan Data dan Informasi, Evaluasi Pengembangan Kesisteman/Program, Pengendalian Sistem Informasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Pengendalian Administrasi. Penerimaan Uang Daerah dan Optimalisasi Dana Daerah, Peningkatan Administrasi Penerbitan Surat Perintah Membayar yang membebani APBD.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain : Terciptanya Sistem perbendaharaan daerah yang tertib, transparan dan efektif, Tersusunnya mekanisme kerja yang didukung oleh teknologi informasi, terciptanya informasi yang akurat tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah, terwujudnya data realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah, serta terciptanya optimalisasi dana daerah. Pelaksanaan kegiatan pada program tersebut, rata-rata telah mencapai 100 %.

- b) Program Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah, ditujukan untuk menyediakan neraca keuangan daerah yang terpercaya dengan meningkatnya efektifitas pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Program ini akan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan antara lain : Peningkatan Proses dan Mekanisme Kerja Pelayanan Keuangan Daerah, Penyempurnaan Sistem Keuangan Daerah, dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain : Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,

Tersusunnya Pelaksanaan Manajemen Keuangan Daerah, Tersusunnya neraca Keuangan Daerah, tersusunnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Tersusunnya SIMKEU Daerah, Pengakuntansian dan penyusunan perhitungan anggaran dan LPJ, terlaksananya administrasi Pengesahan dokumen SPJ, tersusunnya bahan perencanaan penyusunan dan penetapan serta perubahan APBD, terlaksananya pemantauan likuiditas kas terhadap ketersediaan Dana Daerah, Tersusunnya Sistem pelaporan Akuntansi Keuangan Daerah, Terbinanya SDM pengelola Keuangan Daerah, serta terlaksananya sistem monitoring keuangan daerah. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 %.

- c) Program Peningkatan Penerimaan Daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan.

Program ini dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan antara lain : Peningkatan Fasilitas Layanan Pendapatan Daerah, peningkatan Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta pusat, Peningkatan Tertib Administrasi dan Sistem Informasi PKB-BBN-KB, Peningkatan Penerimaan PKB-BBN-KB, Peningkatan Pengawasan Pemeriksaan Pajak Daerah, Peningkatan Penagihan Pajak, Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan, Peningkatan Pengendalian Kinerja Pendapatan Daerah, Peningkatan Penyusunan Peraturan Pendapatan Daerah, Peningkatan Pengendalian Pemungutan dan Penerimaan Pendapatan Daerah, Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan, Peningkatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Peningkatan koordinasi Penerimaan bagi hasil pajak, Peningkatan Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut antara lain : Tercapainya penerimaan daerah yang optimal guna pelaksanaan pembangunan, Tersusunnya suatu sistem dan pola penerimaan daerah yang efektif dan efisien, Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi Daerah, Terciptanya partisipasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam proses pemungutan pendapatan daerah, Terlaksananya pelatihan auditor bagi aparat, Terwujudnya

peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat yang terkait dengan pendapatan daerah, Tersusunnya sistem on line pemungutan pajak, Terwujudnya kegiatan pengawasan pemungutan pendapatan daerah, Terciptanya peningkatan kegiatan tertib administrasi dan sistem informasi pendapatan daerah, Terwujudnya peningkatan penagihan pasif dan aktif terhadap tunggakan pendapatan daerah, serta tercapainya target pendapatan tahun 2006. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 %.

- d) Program Peningkatan Administrasi dan pengelolaan Aset Daerah, ditujukan untuk penataan data atau informasi aset daerah sebesar 60% dari nilai aset yang ada, dan tersedianya standar kebutuhan barang daerah untuk berbagai kegiatan.

Program ini untuk melaksanakan kegiatan antara lain :

Penyelesaian status lahan milik/dikuasai pemerintah provinsi DKI Jakarta, peningkatan penatausahaan Aset Daerah, peningkatan pengamanan aset daerah, peningkatan Administrasi dan. Pengelolaan Aset Daerah.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain Terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang baik, Tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah dan didukung dengan data yang valid serta akurat, Terinventarisasinya barang daerah secara lebih efektif dan efisien, Terselenggaranya Sistem Informasi Historis Fasos Fasum; Tersusunnya daftar inventaris aset daerah yang lengkap, informatif dan memudahkan pengawasan dan pengamanannya. Tersusunnya Standarisasi Barang, standarisasi harga barang, standarisasi kebutuhan barang daerah; Terlaksananya pemutakhiran dokumentasi aset daerah, terlaksananya sertifikasi aset daerah dan terlaksananya penyelesaian masalah tanah dan bangunan. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100%.

## **5) Fungsi Sistem Informasi**

Fungsi sistem informasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan sistem informasi, teknologi informasi dan geo informasi dalam pelaksanaan pemerintah dan

pembangunan daerah serta meningkatkan kemampuan penyediaan data-data pembangunan secara terpadu melalui usaha pembangunan sistem statistik, sistem data elektronik daerah serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih baik. Selain itu juga untuk meningkatkan sistem kehumasan dan protokol dalam rangka mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat luas.

Pada penetapan anggaran Tahun 2006 fungsi ini mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan Program Pengembangan Teknologi Informasi, Program Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi, Program Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan, serta Program Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Capaian fungsi ini antara lain (1) Terwujudnya implementasi public service Analytic tahap 2; (2) Terlaksananya pengembangan sistem pendapatan daerah terpadu tahap 2; (3) Terlaksananya sistem informasi e-pricurement tahap 2; (4) Tersusunnya hasil evaluasi dan desain aplikasi finansial terpadu tahap 2; (5) Terintegrasinya aplikasi kependudukan tahap 2; (6) Terwujudnya pengembangan infrastruktur WAN terpadu tahap 2.

Adapun penjelasan dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Teknologi Informasi, ditujukan untuk sistem informasi manajemen yang terpadu lintas bidang, tersedianya data atau informasi lintas bidang yang mudah diakses.

Pada program ini dialokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

Pembangunan Sistem Informasi untuk mendukung Pelayanan Publik, Kegiatan Penunjang Operasional, Pembangunan dan Pengintegrasian berbagai Sistem Informasi Sektoral, Pengembangan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, Pengembangan Wawasan aparatur dan Masyarakat dalam Bidang Teknologi Informasi, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pemeliharaan.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain Terciptanya sistem informasi sektoral bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan, Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memacu manajemen pemerintahan yang lebih modern, terwujudnya SIM terpadu lintas bidang,

terwujudnya SIM terpadu yang berbasis web. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mebcapai 100%.

- b) Program Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi, dengan kegiatan prioritas :, peningkatan sumber daya manusia kearsipan, peningkatan pelestarian arsip daerah; peningkatan kelembagaan Kantor Arsip daerah Provinsi DKI Jakarta; peningkatan perencanaan dan pengembangan arsip daerah; peningkatan aktivitas akuisisi dan pengolahan arsip.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : Terlaksananya penyusunan pedoman Memorial Gubernur Provinsi DKI Jakarta, terlaksananya penyusunan master plan kearsipan daerah; terlaksananya penyelamatan/pelestarian arsip/dokumen negara era kabinet Gotong Royong dan kabinet Persatuan Nasional; Terlaksananya penggalian arsip statis konvensional; terlaksananya penataan arsip in aktif; terlaksananya sdiklat kearsipan in aktif dan statis; terlaksananya bimbingan dan pembekalan kearsipan pejabat fungsional, serta serta terlaksananya pemasyarakatan kearsipan kepada organisasi profesi dan tokoh masyarakat; terlaksananya pengolahan arsip/dokumen yang akan disusutkan; terlaksananya perekaman arsip dan dokumen daerah.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100%.

- c) Program Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan, dengan kegiatan prioritas pengolahan dan penyajian data dan informasi, sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah melalui media masa, peningkatan pelayanan informasi publik, peningkatan pelayanan keprotokolan, pengelolaan pelayanan tamu dan perjalanan dinas. Adapun hasil dari program ini antara lain terlaksananya penyusunan dan evaluasi data dan informasi; terlaksananya evaluasi opini dan klarifikasi berita media cetak; terlaksananya publikasi acara/kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan melalui media masa; terlaksananya perawatan advetorial; sponsor artikal dan rubrik khusus; peneribtan majalah media jaya; pelayanan informasi melalui media online Warta DKI "Berita Jakarta Com"; terlaksananya pelayan oleh petugas sarana acara; terlaksananya jamuan resmi; serta terlaksananya pengelolaan penerimaan/pelayanan tamu pimpinan.

Pelaksanaan pada program ini rata-rata telah mencapai 100%.

- d) Program Pemetaan dan Informasi Pertanahan, dengan kegiatan prioritas : Pengembangan pengukuran rekayasa; pengembangan pemetaan geografis dan aplikasi; peningkatan sistem informasi manajemen pertanahan.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain terlaksananya pengukuran leveling titik JKG dan JKGU sebagai basis peta WEB GIS; pengukuran utilitas koridor bus way; terlaksananya pembuatan tiling system peta dasar TM 3 derajat; terlaksananya pengambilan data primer foto udara 1:20.000; terlaksananya pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) pada masing-masing wilayah; terlaksananya pengembangan pelayanan data spasial berbasis Web.. Pelaksanaan kegiatan pada pogram ini rata-rata telah mencapai 100%.

### **c. Bidang Ekonomi**

Bidang ekonomi pada tahun 2006 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp717.292.963.178,00 untuk melaksanakan beberapa fungsi yaitu fungsi industri dan perdagangan, fungsi pariwisata, fungsi pengembangan usaha daerah, fungsi usaha kecil menengah dan koperasi, fungsi peternakan perikanan dan kelautan serta fungsi pertanian dan kehutanan. Sampai dengan akhir tahun 2006 telah direalisasikan sebesar Rp605.791.742.684,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp111.501.220.494,00

#### **1) Fungsi Pariwisata.**

Fungsi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan gerak roda perekonomian daerah melalui pengembangan potensi kepariwisataan yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui Pengembangan Produk Pariwisata, Pengembangan Pasar Pariwisata serta Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata.

Fungsi Pariwisata pada tahun 2006 mempunyai 3 (tiga) program dan 16 kegiatan. Program-program yang telah dilaksanakan pada fungsi pariwisata adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Produk Pariwisata telah melaksanakan kegiatan, antara lain : (a). Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, (b). Peningkatan pembinaan industri pariwisata, (c). Peningkatan pengembangan atraksi pariwisata, (d). Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pariwisata, (e). Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Rutin di Anjungan DKI Jakarta TMII, (f). Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Rutin di Sangkrini Jaya Raya TMII.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : (a). Terselenggaranya penganugerahan Adikarya Wisata 2006 kepada para pelaku kepariwisataan sebanyak 1 kali, ((b). Terselenggaranya atraksi pariwisata sebanyak 10 festival (*golf, entertainment, abang none Jakarta, meeting service, Kite, Shopping, Wall Climbing, Marine, Dining, dan Jak Jazz festival*) (c). Terselenggaranya Enjoy Jakarta Golf Festival 2006, Enjoy Jakarta Entertainment Festival, Enjoy Jakarta Shopping Festival, Enjoy Jakarta Marine Festival, Enjoy Jakarta Dining Festival sebanyak 1 kali.

(d). Terselenggaranya pemilihan Abang dan None Jakarta Tahun 2006 sebanyak 36 Finalis (e). Terselenggaranya Atraksi Kesenian Budaya di Anjungan Propinsi DKI Jakarta TMII dan di Sangkrini Jaya Raya TMII. (f). Terlaksananya penyusunan RIPPDA Tahap II sebanyak 1 Kegiatan. (g). Terlaksananya penataan estetika lingkungan koridor Pasar Baru 450 M2. (h). Terlaksananya desain dan pembangunan gerbang PIK Pulogadung 450 M2.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

- b) Program Pengembangan Pasar Pariwisata telah melaksanakan kegiatan, antara lain : (a) Pembuatan bahan promosi kepariwisataan, (b). Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik, (c). Promosi pariwisata di dalam negeri, (e). Promosi pariwisata di luar negeri.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : (a). Tersedianya *leaflet*, bulletin, brosur, dan guide book pariwisata Jakarta di tempat-tempat strategis secara berkala dalam jumlah yang memadai, (b). Keikutsertaan dalam berbagai event/festival serta kongres di dalam dan luar

negeri, (c). Meningkatnya promosi melalui media cetak dan elektronik. (d). Terselenggaranya promosi pariwisata di dalam dan luar negeri, Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

- c) Program Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata telah melaksanakan kegiatan, antara lain : (a). Peningkatan sarana, prasarana kerja dan pelayanan pariwisata, (b). Peningkatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan, (c). Peningkatan kualitas pegawai Dinas Pariwisata, (d). Peningkatan Pelayanan Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisata.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain, : Meningkatnya SDM pegawai serta terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana Kantor Dinas dan UPT.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

## **2) Fungsi Industri dan Perdagangan**

Fungsi Industri dan Perdagangan diarahkan untuk menjadikan industri yang mampu menyerap lapangan kerja, teknologi ramah lingkungan, meningkatkan nilai tambah industri serta berorientasi ekspor. Sementara perdagangan di DKI Jakarta diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan penekanan pada kepuasan pelanggan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan, Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan, Penataan Jaringan distribusi Produk Industri dan Perdagangan, Pengembangan Ekspor.

Fungsi Industri dan Perdagangan dilaksanakan untuk membiayai 4 (empat) program dan 18 kegiatan. Program yang telah dilaksanakan pada fungsi Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a) Program Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan, antara lain : (a) Pengembangan data dan informasi industri dan perdagangan, (b). Pengawasan terhadap usaha besar, usaha kecil industri hulu dan hilir, (c). Pengembangan industri dan perdagangan yang bersifat non polusi, hemat air dan berteknologi, (d). Peningkatan dan pengembangan produk industri dan perdagangan, (e). Peningkatan

perdagangan dalam negeri, serta (f). Pengembangan usaha industri dan perdagangan.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : Tercapainya kemitraan industri kecil, besar dalam bentuk klaster, Terkendalinya limbah B3, UKL/UPL dan SPPL industri di DKI Jakarta, Terselenggaranya pemasyarakatan tentang penerapan penanganan limbah industri cat dan elektroplating di wilayah DKI Jakarta, Meningkatnya pendaftaran merek dagang bagi hasil produksi kerajinan di DKI Jakarta, Terfasilitasinya Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi industri furniture.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

- b) Program Penataan dan Pengembangan Produksi Industri dan Perdagangan, telah melaksanakan kegiatan, antara lain : Peningkatan pengembangan industri dan perdagangan, Pengembangan kerjasama antara sentra-sentra industri dengan pengusaha asosiasi dan Kadin, serta Kajian strategis tentang hak-hak Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan di sektor industri dan perdagangan dalam rangka otonomi daerah.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : (a). Tercapainya kemitraan antara asosiasi/Kadin sektor industri dan perdagangan, (b). Terlaksananya pengidentifikasian bengkel elektronika yang memanfaatkan kartu garansi pada produk elektronika, (c). Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi produk SNI wajib lingkup ILMEA, (d). Terselenggaranya Forum Konsultasi Pembangunan (FKP) yang dikoordinasikan oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan.

Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

- c) Program Penataan Jaringan Distribusi Industri dan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan, antara lain : (a). Penataan Jaringan Distribusi Produk Industri dan Perdagangan, (b). Pengawasan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, (c). Pembangunan Pusat Grosir Agro. Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain adalah (a). Terselenggaranya pelaksanaan pasar lelang forward kebutuhan bahan pokok masyarakat DKI Jakarta, (b). Terlaksananya monitoring perkembangan harga

kebutuhan pokok masyarakat DKI Jakarta di pasar tradisional, (c). Terlaksananya pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar, (d). Terlaksananya pemasyarakatan TDP melalui media elektronik dan cetak, (e). Tersusunnya regulasi Pusat Grosir Agro, (f). Terlaksananya persiapan kerjasama pembangunan Pusat Grosir Agro. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

- d) Program Pengembangan Ekspor, telah melaksanakan kegiatan, antara lain : (a). Pengembangan promosi dalam dan luar negeri, (b). Peningkatan informasi usaha ekspor.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : (a) Keikutsertaan dan partisipasi pada pameran industri dan perdagangan di dalam dan luar negeri, (b). Terselenggaranya seminar peluang dan tantangan ekspor furniture ke negara non tradisional. Pelaksanaan kegiatan pada program ini rata-rata telah mencapai 100 persen.

### **3) Fungsi Pengembangan Usaha Daerah**

Fungsi Pengembangan Usaha Daerah diarahkan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha daerah sehingga mampu berkembang dan bersaing secara sehat di era globalisasi sebagai sumber penerimaan daerah.

Untuk mencapai kebijakan dimaksud, maka diperlukan strategi mengoptimalkan penataan dan restrukturisasi usaha daerah dalam rangka memperbaiki kinerja dan profesionalisme pengelolaan usaha daerah, sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan produktif serta mampu bersaing secara sehat di era globalisasi serta meningkatkan kualitas dan informasi pelayanan investasi disertai dengan iklim investasi yang kondusif, sehingga swasta mampu berkembang dalam era pasar bebas, mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Fungsi Pengembangan Usaha Daerah pada tahun 2006 mempunyai 3 (tiga) program yaitu Program Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT, Patungan), Peningkatan Pelayanan dan Penanaman Modal Usaha Swasta Lain, Pemberdayaan Asset Daerah.

Program-program yang telah dilaksanakan pada Fungsi Pengembangan Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

- a). Program Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT, Patungan) telah melaksanakan kegiatan, yaitu Pengembangan Usaha BUMD dan Peningkatan PAD yang bersumber dari BUMD, Peningkatan Kinerja PD/BUMD/PT Patungan, Penataan Sistem Pelayanan Perparkiran, Penataan Sistem Pungutan Retribusi Parkir, Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perparkiran, Sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 realisasi fisik rata-rata telah mencapai 100 persen.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : Tersedianya tenaga Satuan Pengendali Intern pada BUMD yang terlatih, Tersedianya hasil analisa dan evaluasi pada program dan kerja BUMD, Tersusunnya draft Sub Holding Company, Diketuainya kinerja BUMD berdasarkan Balanced Score Card, Tersusunnya draft BUMD Bidang energi.

- b). Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain telah melaksanakan kegiatan, yaitu Penelitian Usaha-usaha Potensial, Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang untuk Pelaksanaan Penanaman Modal, Peningkatan Kemampuan SDM, Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal, Pemantauan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Kerjasama Antar Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 realisasi fisik rata-rata telah mencapai 100 persen.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : Tersusunnya profil investasi Jakarta, Terlaksananya forum investasi dalam rangka informasi investasi dan iklim dunia usaha investasi di DKI Jakarta, Tersosialisasinya peluang investasi di media elektronik, Terlaksananya promosi investasi, Tersosialisasinya prosedur dan pelayanan perijinan penanaman modal PMA/PMDN, Terevaluasinya realiasi investasi dan tersusunnya statistik PMA/PMDN, Terselenggaranya pertemuan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal se-Jawa Bali.

- c). Program Pemberdayaan Aset Daerah telah melaksanakan kegiatan, yaitu, Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 realisasi fisik rata-rata telah mencapai 100 persen.

Adapun hasil yang dicapai dari program tersebut, antara lain : Terlaksananya pemutakhiran data aset yang potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Tersedianya calon mitra untuk pemberdayaan aset daerah, Terevaluasinya pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah diikuti dengan tindak lanjut.

#### **4) Fungsi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi**

Fungsi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing sektor Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi sehingga mampu memberikan kontribusi perekonomian perkotaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan usaha skala mikro yang sehat dan dinamis berlandaskan sistem ekonomi partisipatif dalam rangka mengurangi kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ekonomi serta menata usaha kaki lima. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha di bidang koperasi adalah dengan cara memperluas dan mengembangkan usaha koperasi, memperluas kesempatan berusaha bagi koperasi dan memperkuat kelembagaan koperasi agar menjadi koperasi sebagai gerakan masyarakat. Program-program yang telah dilaksanakan pada fungsi usaha kecil, menengah dan koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Program Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro telah dilaksanakan empat kegiatan, antara lain Penataan dan Pembinaan Usaha Skala Mikro/PKL, Peningkatan Sarana Usaha Skala Mikro, Pengawasan dan Pengendalian PKL dan Penataan Lokasi Binaan/Lokasi Penampungan Usaha PKL. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 terealisasi fisik mencapai 99,72 persen.

Adapun hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program tersebut antara lain, penetapan lokasi usaha skala mikro/PKL melalui Keputusan Gubernur, terlaksananya Pembangunan One Village One Produk 1 (satu) kawasan, Pondok Rangon Jakarta Timur dan terlaksananya pembuatan fitting out/interior gedung pusat promosi UKM di Waduk Melati untuk menunjang

sarana dan prasarana display produk UKM serta terlaksananya renovasi 4 lokasi binaan (LOKBIN) penampungan usaha PKL di Bintaro, Muria Dalam, Palmerah dan Makasar serta pengadaan genzet dan instalasi pada gedung pusat ikan hias UKM Johor Baru untuk menunjang sarana dan prasarana peralatan listrik ikan hias.

- b) Program Pemberdayaan UKM & Koperasi telah dilaksanakan 7 kegiatan antara lain : 1).Pengembangan Ketatausahaan KUKM, 2).Peningkatan Promosi KUKM, 3).Pemberdayaan Koperasi, 4).Pendampingan Koperasi dan Pemutakhiran Data KUKM, 5).Peningkatan Pelayanan Pembentukan Badan Hukum Koperasi, 6).Peningkatan dan Pengembangan UKM serta 7). Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pemberdayaan KUKM. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 terealisasi fisik mencapai 84,55 persen.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program tersebut yang prioritas anantara lain, pembelian alat daftar hadir pegawai untuk mengukur kinerja pegawai, Pemasangan instalasi PAM, Gedung Pusat Ikan Hias untuk menunjang fasilitas air bersih bagi ikan hias, Prospek Mandiri Penciptaan Model Pertumbuhan Usaha Baru bagi para sarjana, terselenggaranya gelar pasar rakyat 5 kali, Partisipasi Pameran dan Promosi KUKM 13 event, terselenggaranya Jakarta UKM EXPO di Semanggi Expo, Penilaian Klasifikasi Koperasi Tingkat Provinsi 100 Koperasi, Restrukturisasi KSU di DKI Jakarta, 10 KSU, Kajian draft Perda tentang perkoperasian di DKI Jakarta, Peningkatan Pelayanan Badan Hukum Koperasi, Penilaian UKM Berprestasi 20 UKM, terjalannya kerjasama UKM antar Provinsi Makasar, Gorontalo, Jambi, Bengkulu, dan Padang.

- c) Program Pengembangan Kewirausahaan telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, antara lain Peningkatan Kemandirian Wirausahawan melalui KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) 2006 terealisasi fisik mencapai 100 persen.

Adapun hasil yang telah dicapai pada pelaksanaan program tersebut antara lain adalah terwujudnya kerjasama KKMB dengan beberapa Perguruan Tinggi dan Asosiasi seperti IWAPI dan KADIN dalam rangka pengembangan

permodalan KUKM dan terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Usaha sebanyak 100 orang, Diklat Koperasi sebanyak 75 orang dan Diklat Kewirausahaan dan Manajemen sebanyak 100 orang.

- d) Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro telah direalisasikan 6 (enam) kegiatan, antara lain 1). Pengembangan KSP/USP, 2).Pengembangan Akses Permodalan KUKM 3). Peningkatan Permodalan KUKM, 4) Pengawasan Pengendalian Permodalan Usaha Skala Mikro, 5).Peningkatan Kemampuan KUKM dalam memanfaatkan dana bantuan Permodalan dan 6). Pengawasan dan Pengendalian Pemberdayaan LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2006 terealisasi fisik mencapai 99,91 persen.

Adapun hasil yang telah dicapai pada pelaksanaan program tersebut yang prioritas antara lain; terselenggaranya penilaian kesehatan KSP/USP, sebanyak 218 koperasi, terpasangnya sistem direktori pusat informasi pasar UKM Waduk Melati, Peningkatan Produktifitas dan Audit Ekstren Koperasi sebanyak 23 Koperasi , Lokakarya Kebijakan Program Bantuan Permodalan oleh Pemerintah/Swasta kepada pelaku usaha bagi koperasi & UKM.

#### **5) Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan**

Fungsi Peternakan, Perikanan dan Kelautan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok usaha peternakan, perikanan dan nelayan meningkatkan sumber daya hasil laut dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Strategi yang ditempuh pada fungsi ini antara lain adalah meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil ternak, mengawasi peredaran daging, BAH (Bahan Asal Hewan) dan HBAH (Hasil Bahan Asal Hewan) sehingga ketersediaan hasil ternak selalui terpenuhi, tercukupi dan dapat dikonsumsi secara aman dengan harga terjangkau.. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi peternakan, perikanan darat maupun laut yang berdaya saing tinggi untuk menjamin

ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat, meningkatkan ketersediaan produk peternakan dan perikanan, serta memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan serta untuk meningkatkan kerjasama dengan provinsi di luar Jakarta yang dapat menjamin suplai warga kota Jakarta.

Pada Tahun Anggaran 2006 program ini melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan diantaranya antara lain yaitu Peningkatan pelayanan kesehatan hewan ternak dan ikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Produksi Perikanan, Pengembangan usaha perikanan, Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan, Peningkatan Pembinaan Masyarakat di bidang usaha peternakan dan perikanan, serta pengembangan teknologi pengolahan hasil peternakan.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain Menurunnya jenis penyakit hewan dan ikan di DKI Jakarta, tersedianya sarana dan prasarana penunjang guna peningkatan produksi peternakan dan perikanan, menurunnya tingkat penularan penyakit hewan pada manusia, meningkatnya pembinaan pembudidaya ternak dan ikan dengan menggunakan teknologi baru, serta meningkatnya jumlah produk olahan hasil perikanan dan peternakan. Dari kegiatan yang dilaksanakan pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan, yang diarahkan untuk mengembangkan dan menata sistem penyediaan serta distribusi produk peternakan dan perikanan sehingga menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi (daging, telur dan ikan) bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas memadai di DKI Jakarta.

Pada Tahun Anggaran 2006 program ini melaksanakan 4 (empat) kegiatan, antara lain Peningkatan pelayanan dan Pengawasan Kesmavet; Peningkatan penyediaan hasil peternakan dan perikanan, Peningkatan pelayanan perijinan dan distribusi hasil peternakan dan perikanan, dan peningkatan mutu hasil peternakan dan perikanan, peningkatan sarana prasarana dan pelayanan pengujian laboratorium kesmavet.

Adapun hasil yang telah dicapai antara lain terlaksananya pembinaan kerjasama teknis dan non teknis dengan daerah produsen ternak dan ikan; tersedianya pangan asal hewan (daging, ikan, telur dan susu) yang aman, sehat dan rekomendasi sertifikat halal; tersedianya informasi produk perikanan yang mutakhir, Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna dan alat mekanis pengering ikan bagi 50 orang pengolah ikan. Dari kegiatan yang dilaksanakan pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Laut, yang diarahkan untuk mengembangkan, memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya laut untuk mendorong tumbuhnya perekonomian, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat kelautan.

Pada Tahun Anggaran 2006 program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu antara lain kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan.

Hasil yang telah dicapai oleh program ini antara lain adalah Meningkatnya Kualitas Terumbu Karang sebesar 5 persen pada perairan laut yang ada di Kepulauan Seribu, terkendalinya ekosistem laut dan pesisir pantai di DKI Jakarta Sebesar 30 persen, dan meningkatnya fish shelter menjadi 360 buah. Dari kegiatan yang dilaksanakan pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

## **6) Fungsi Pertanian Dan Kehutanan**

Fungsi Pertanian dan Kehutanan diarahkan untuk menciptakan pola pertanian perkotaan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi tinggi, Menciptakan ketersediaan pangan dan gizi yang cukup dengan harga terjangkau, meningkatkan daya dukung lingkungan melalui penghijauan, konservasi hutan lindung dan hutan kota serta meningkatkan pengendalian penggunaan/konsumsi kayu. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan, diarahkan untuk menyempurnakan model pertanian perkotaan berlahan sempit yang padat teknologi yang dapat berfungsi sebagai penyangga lingkungan hidup perkotaan dan ekosistemnya, memperlancar jalur distribusi produk pertanian dan kehutanan dari produsen ke konsumen sehingga harga produk tersebut dapat dikendalikan serta menerapkan standarisasi mutu komoditas pertanian dan hasil hutan serta pengawasan peredaran produk pertanian dan hasil hutan.

Pada Tahun Anggaran 2006 program ini melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan yang meliputi Peningkatan Produksi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura, Penelitian, pengembangan dan penyuluhan pertanian dan kehutanan, Peningkatan produksi tanaman hias, Pengembangan usaha dan pemasaran, Peningkatan mutu dan keamanan pangan, Peningkatan kualitas kayu dan olahan hasil hutan, serta Peningkatan pelayanan peredaran hasil hutan.

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah Meningkatnya sarana dan prasarana kebun bibit pertanian dan kehutanan, Meningkatnya operasional pelayanan pengendalian organisme tanaman pengganggu sebanyak 12 motor karoseri khusus, Meningkatnya sarana dan prasarana laboratorium kultur jaringan tanaman anggrek dan pisang, Meningkatnya mutu dan keamanan produk hasil pertanian segar maupun olahan, Termanfaatkannya SPU ( Simple Processing Unit) produk pertanian bagi 18 kelompok, Terbangunnya 120 m<sup>2</sup> pengembangan kantor pengelola Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan (P3HPHH), Meningkatnya operasional pelayanan pengolahan, pengawetan dan pengeringan kayu, dan terkendalinya peredaran hasil hutan. Dari kegiatan yang dilaksanakan pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Pengembangan Hutan, diarahkan untuk meningkatkan fungsi hutan kota sebagai hutan wisata, hutan lindung dan hutan cagar alam dalam upaya memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk keindahan kota dan

paru-paru kota dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada Tahun Anggaran 2006 program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan antara lain Penghijauan/Ijo Royo-royo yang merupakan dedicated program, Perlindungan dan pelestarian Sumberdaya Alam Hayati, dan Peningkatan Pembinaan Kehutanan.

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah Tertanamnya 2000 pohon di kawasan hutan kota BPLIP Pulo Gadung, Tertanamnya 2000 pohon di hutan kota kawasan Industri PT. Astra Honda, Tertanamnya 3000 pohon di kawasan Agrowisata P. Tidung Kecil, Meningkatnya sarana dan prasarana Agrowisata Cilangkap, Meningkatnya sarana dan prasarana di 7 (tujuh) kebun bibit pertanian, Meningkatnya jumlah tanaman penghijauan di 45 Kelurahan sebanyak 22.500 pohon tanaman produktif instan tree, Meningkatnya Kawasan Mangrove di Pulau Rambut sebanyak 20.000 pohon, Terkendalinya kawasan mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk seluas 1,5 Ha dan kawasan Tol Sedyatmo seluas 1,5 Ha, terbangunnya jalan kontrol di Hutan Lindung Angke Kapuk sepanjang 127 M' dan di kawasan Tol Sedyatmo sepanjang 141 M', Meningkatnya produktifitas lahan sawah seluas 80 ha, Meningkatnya sarana dan prasarana hutan kota Srengseng Jakarta Barat. Dari kegiatan yang dilaksanakan pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

#### **d. Bidang Pendidikan dan Kesehatan**

Pada Tahun Anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.420.432.077.998,00 untuk membiayai 2 fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah direalisasikan Rp2.162.842.522.726,00 dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp257.589.555.272,00

##### **1) Fungsi Pendidikan**

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Propinsi DKI Jakarta menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat

meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melaksanakan 5 (lima) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar, diarahkan untuk menjawab adanya program wajib belajar selama 9 tahun, yaitu sampai dengan lulus SLTP dan sederajat yang meliputi pendidikan tingkat SD, SLTP, dalam hal ini termasuk pendidikan keagamaan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan madrasah Tsanawiyah (MTs)., dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, penyediaan sistem manajemen pembiayaan pendidikan dasar, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dasar, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar dan manajemen pengelolaannya, rehabilitasi gedung SDN/ SMPN dan pendukung kegiatan operasional kantor.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersedianya Biaya Operasional Pendidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs negeri, terlaksananya ujian sekolah SD/MI dan SMP/MTs, , terlaksananya Pendidikan Guru SDN/SMPN ke Strata 1 untuk 1060 guru, terlaksananya rehabilitasi total dan berat serta pengadaan mebel pengganti. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, diarahkan untuk meningkatkan akses memperoleh pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus dan menyediakan pelayanan pada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan ketrampilan, serta potensi pribadi serta pemberian pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya dan anggota keluarga., dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah dan Pra Sekolah, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan non formal, peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan non formal, peningkatan kuantitas dan kualitas

pendidik dan tenaga kependidikan non formal, Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nonformal, peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen pendidikan non formal dan percepatan pemberantasan buta aksara melalui pendidikan keaksaraan fungsional dan pembinaan berkelanjutan aksarawan.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain: terlaksananya ujian nasional paket A, B dan C, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di 6 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ,terlatihnya 574 tutor /pengajar non formal, terakreditasinya 200 lembaga kursus, dan meningkatnya penyelenggaraan kegiatan kesetaraan SLTP dan SMA di PKBM .Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c) Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengahda Umum dan Kejuruan diarahkan untuk 1) memperluas jangkauan dan daya tampung sekolah menengah umum (SMU) / MA dan sekolah menengah kejuruan (SMK), 2) meningkatkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dan masyarakat miskin, 3) meningkatkan kualitas pendidikan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja, 4) meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang tersedia, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk program pendidikan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pendidikan, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Sekolah Menengah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tenaga pendidikan, peningkatan fasilitas sumber dan bahan belajar, peningkatan kualitas pembelajaran sekolah menengah, pengembangan sekolah menengah atas dan kejuruan, peningkatan peran masyarakat dan DU/ DI dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas manajemen pendidikan, peningkatan pembinaan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas fungsional pendidik dan tenaga pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas

teknis tenaga pendidikan, pembangunan gedung baru SMA/ SMK Negeri serta pendukung kegiatan operasional kantor.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain : terlaksananya Penerimaan Siswa Baru (PSB) secara online pada 176 sekolah, tersedianya operasional pendidikan untuk 116 SMA dan 60 SMK negeri,tersedianya 5932 buku bahan ajar kelas x, tersedianya peralatan praktek pada 42 sekolah kejuruan, tersedianya mebel pengganti di 75 SMA/SMK, Terlaksananya inisiasi wajib belajar 12 tahun, terlaksananya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan buku perpustakaan, dan lab bahasa, terlaksananya ujian tingkat sekolah, tersusunnya modul CBT (Competency Based Training) 10 program keahlian SMK, rehab gedung SMU/ SMK, terselenggaranya lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat nasional XIV tahun 2006, terlaksananya uji kompetensi guru SMA, SMK dan MAN serta terbinanya Tim Olimpiade .Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- d) Program Pengendalian dan Informasi Perguruan Tinggi, diarahkan untuk menggalang kerjasama dan memberikan informasi penelitian antar perguruan tinggi yang ada di Wilayah Propinsi DKI Jakarta, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan perumusan kebijakan Pemda berdasarkan hasil penelitian Perguruan Tinggi.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terkoordinasinya kemitraan Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, tersedianya data dan peta penyelenggaraan perguruan tinggi di DKI Jakarta, dan terbinanya organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi kelembagaan ekstra kampus berbasis mahasiswa. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- e) Program Pengembangan Perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan daya nalar masyarakat melalui pemberdayaan perpustakaan yang sudah ada, mengembangkan perpustakaan dan meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan di DKI Jakarta . Untuk mendukung program tersebut telah dilaksanakan kegiatan antara lain pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terbentuknya 100 perpustakaan pemukiman, meningkatnya koleksi/bahan pustaka, dan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan menjadi 119%. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

## **2) Fungsi Kesehatan**

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif pada masyarakat serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dibidang kesehatan; meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui dukungan sarana, prasarana dan SDM bidang kesehatan yang lebih baik; meningkatkan kecepatan dan kesiapan dalam memberikan penanganan keadaan darurat, dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada serta SDM bidang kesehatan, tanpa melihat dari golongan mana masyarakat yang membutuhkan pelayanan; dan perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan dengan melaksanakan 4 program dan 42 Kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat, diarahkan untuk Meningkatkan prosentase cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain adalah Pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, Peningkatan gizi komunitas, Peningkatan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain dilaksanakannya Pertemuan berkala penyakit tidak menular prioritas di DKI Jakarta, Surveilans Data Program Penyakit Tidak Menular, Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Mellitus, penyusunan MUTU PENANGGULANGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DAN ANAK SD/MI, Penyusunan Pedoman mutu sarana air bersih dan jamban keluarga, Penyusunan Pedoman Mutu Pengawasan dan Pengendalian Limbah, Penyusunan prosedur, sosialisasi dan lokakarya prosedur mutu, Public private mix puskesmas, RS dan fasilitas swasta, Penyusunan, sosialisasi, lokakarya Prosedur Mutu Klinik , Konseling Infeksi

Peny Menular Sex, Klinik Pencegahan Penularan Ibu ke Bayi dan Pengobatan Metadon Subtitus, Penyusunan Prosedur, sosialisasi dan lokakarya Mutu Penanggulangan DBD, Evaluasi Tahunan Penyakit menular. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, diarahkan untuk Meningkatkan sarana kesehatan yang melaksanakan Quality Assurance (QA), dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialis, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Farmakmin dan Peningkatan penunjang pelayanan kesehatan dalam antisipasi KLB dan saat KLB. Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain Penyusunan Pedoman Revitalisasi Puskesmas, Penyempurnaan standar rawat inap di Puskesmas, Penyusunan Kebijakan tentang pelayanan Perinaristi di RSD, Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Anak, Remaja, Ibu dan Usila dalam rangka Revitalisasi Puskesmas, Pedoman Pelayanan Akupunktur Kesehatan Tradisional di Propinsi DKI Jakarta, Kajian Dokumen Informasi Sentra Pengembangan dan penerapan pengobatan Tradisional ( SP3T) untuk menjadi Rancangan Keputusan, Pedoman Pelayanan Kefarmasian di RSD, Monitoring Efek samping obat dan alat kesehatan di Rumah sakit dan Puskesmas, Peningkatan pengetahuan petugas Rumah Sakit dalam masa KLB tentang penanggulangan penyakit menular di Rumah Sakit, Operasional distribusi obat dalam antisipasi KLB dan saat KLB. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.
- c) Program Penanganan Gawat Darurat, diarahkan untuk Meningkatkan persentase jumlah pasien yang tertangani, terutama masyarakat tidak mampu), dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat Bencana dan Penyakit dalam antisipasi KLB dan pada saat KLB, Upaya Peningkatan Pelayanan Siaga Kesehatan, Upaya Peningkatan Penyiapan Penduduk dan Logistik, upaya Peningkatan

Komunikasi Pelayanan Gawat Darurat & Bencana. Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain Operasional Siaga 24 Jam PUSDALDUKKES dalam rangka antisipasi KLB dan pada saat KLB di Propinsi DKI Jakarta (DP), Dukungan Operasional Kesehatan lapangan Gawat darurat dan Bencana dalam rangka antisipasi KLB dan pada saat KLB di Propinsi DKI Jakarta (DP), Antisipasi dan Penanggulangan KLB Penyakit, Pekan Sadar Bencana Bidang Kesehatan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan KLB dan bencana lainnya. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- d) Program Perbaikan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, diarahkan untuk Meningkatkan kualitas SDM dan mutu pelayanan kesehatan dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pendayagunaan dan Pengendalian Tenaga Kesehatan, Pembinaan Institusi Diknakes, Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan dalam rangka antisipasi KLB dan pada saat KLB, Peningkatan Akreditasi dan Pengukuran Mutu, Peningkatan promosi dan sosialisasi kesehatan dalam rangka antisipasi KLB dan pada saat KLB, penyediaan data dan informasi dalam rangka antisipasi KLB dan pada saat KLB; Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka antisipasi KLB dan pada saat KLB dan Peningkatan pelayanan keluarga miskin dan bencana . Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain Persiapan Forum Mediasi Pengaduan dan Penyelesaian masalah kesehatan di Propinsi DKI Jakarta, Pembinaan Lembaga Kesehatan, Rekrutmen dan pelatihan Survey Kesehatan Daerah, Sosialisasi antisipasi kejadian luar biasa (KLB)/ Bencana melalui siaran Radio/ pembuatan dan penggandaan media cetak leaflet dan poster/ pemuatan artikel kesehatan di media cetak harian/ koran/ melalui jejaring kemitraan, Antisipasi kejadian luar biasa/ bencana dengan pengembangan aplikasi call center, Sosialisasi pencegahan wabah flu burung dan DBD, Sosialisasi program prioritas kesehatan melalui media Televisi, Penyediaan Dana JPK Gakin dan Bencana. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

#### **e. Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan**

Pada Tahun Anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp209.157.458.496,00 untuk membiayai 2 fungsi, yaitu fungsi kependudukan dan fungsi ketenagakerjaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, anggaran pada bidang ini telah direalisasikan Rp184.756.136.929,00 dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp24.401.321.567,00.

##### **1) Fungsi Kependudukan**

Fungsi Kependudukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui upaya pengendalian urbanisasi, pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program KB serta pelayanan kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil dengan melaksanakan 2 program.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung fungsi ini adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengendalian Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk terutama yang berkaitan dengan fertilitas guna mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagai inti dari masyarakat madani, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain. meningkatkan jumlah pasangan usia subur yang ber KB mandiri, meningkatkan jumlah peserta KB, meningkatkan pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga dan remaja terhadap kesehatan reproduksi, meningkatkan prosentase pasangan usia subur yang terlayani program KB, menurunkan angka kelahiran total serta menurunkan jumlah perkawinan usia dini. Dalam program ini telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan pencapaian peserta KB baru dan aktif serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan upaya masyarakat terhadap penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain meningkatnya wawasan masyarakat tentang peraturan kependudukan dan terkoordinasinya forum kerjasama dibidang pengawasan mobilitas orang asing serta di bidang urbanisasi penduduk, meningkatnya wawasan masyarakat tentang peraturan kependudukan dan terkoordinasinya forum kerjasama dibidang pengawasan mobilitas orang asing serta di bidang urbanisasi penduduk pelayanan KB melalui mobil di 40 lokasi serta penyuluhan kesehatan reproduksi dan pelayanan KB di posyandu sebanyak 682 orang.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, diarahkan untuk terwujudnya administrasi kependudukan yang baik, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan monitoring dan pengawasan mobilitas penduduk, dan peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan sistem komputerisasi kependudukan dan catatan sipil, pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan sumber daya manusia, serta peningkatan pengelolaan administrasi dukcapil.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain. terpeliharanya aplikasi SIMDUK, pengadaan perangkat SIMDUK, serta tersedianya data penduduk yang up to date. Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

## **2) Fungsi Ketenagakerjaan**

Fungsi Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta agar terampil dan mahir, mampu menyelesaikan tugas-tugas ketenagakerjaan secara handal dan profesional sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, pembangunan fungsi ketenagakerjaan ini juga dimaksudkan untuk menekan dan mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, fungsi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja yang produktif dan berkesinambungan baik di dalam maupun di luar negeri serta mengembangkan kemampuan usaha mandiri

terutama di sektor jasa dan perdagangan. Fungsi ini memiliki 3 program dan 17 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a). Program Pengembangan Kesempatan Kerja, diarahkan untuk meningkatkan informasi ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja untuk masyarakat dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terselenggaranya pendataan lowongan kerja pada perusahaan, penempatan tenaga kerja, pengenalan dunia kerja pada sekolah kejuruan serta pembinaan peningkatan produktifitas kerja pada perusahaan kecil.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b). Program Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja, diarahkan untuk meningkatkan perlindungan, pengawasan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan khususnya bagi perempuan, menurunkan demonstrasi masalah ketenagakerjaan dan kebijakan perusahaan, menurunkan kasus pelanggaran ketenagakerjaan serta meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terlindungi oleh program jamsostek. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini antara lain peningkatan kesejahteraan pekerja dan pembinaan pelaksanaan sarana hubungan industrial.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terselenggaranya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja sebanyak 1500 perusahaan, pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja pada perusahaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c). Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, diarahkan untuk meningkatkan upah dan produktivitas tenaga kerja dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain pelatihan dan produktivitas, pemagangan serta pelatihan keterampilan kerja pada BLK / BLKD Provinsi DKI Jakarta.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terselenggaranya pelatihan keterampilan kerja di 7 BLK / BLKD Provinsi DKI Jakarta (BLKD Jakarta Pusat, BLKD Jakarta Utara, BLKD Jakarta Barat, BLKD Jakarta Selatan, BLKD Jakarta Timur, BLK Khusus Las Condet dan BLK Pengembangan Industri Pasar Rebo) sebanyak 2.780 orang, peningkatan produktivitas nelayan serta terselenggaranya pemagangan baik di dalam maupun ke luar negeri.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

#### **f. Bidang Sosial dan Budaya**

Pada Tahun Anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp795.308.923.007,00 untuk membiayai fungsi Keagamaan, fungsi Kesejahteraan Sosial, Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Pelestarian Budaya Dan Permuseuman, dan Fungsi Olahraga dan Kepemudaan.

Sampai dengan akhir tahun anggaran secara keseluruhan, pada bidang ini telah direalisasikan Rp645.228.382.653,00, dengan demikian pada bidang ini masih terdapat sisa sebesar Rp150.080.540.354,00.

##### **1) Fungsi Keagamaan**

Fungsi ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana harmonis dan saling menghormati dengan menyempurnakan kualitas pelaksanaan ibadah menurut syariat agamanya masing-masing serta meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 2 program dan 16 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Umat Beragama diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama baik bagi individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara pemerintah Prov. DKI Jakarta; serta untuk meningkatkan kualitas penyuluh, tokoh dan pemuka agama. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini antara

lain Pembinaan Kehidupan Beragama; dan Pembinaan potensi dan bimbingan mental spiritual masyarakat.

Adapun hasil yang telah dicapai pada Program ini antara lain terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama dari Tingkat RT/RW sampai Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk Meningkatkan hubungan yang harmonis antar umat beragama; Pembinaan Remaja Umat Beragama di 5 Wilayah kotamadya sebanyak 70 orang; Pembinaan Tilawah Braille baik di Tingkat Wilayah maupun di Tingkat Provinsi yang bertujuan sebagai ajang seleksi peserta MTQ tuna netra untuk Tingkat Nasional; Bimbingan dan pelatihan manajemen pengurus tempat-tempat ibadah; dan Dialog Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama sebagai salah satu cara untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam hidup beragama. Dari kegiatan yang berada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga sosial keagamaan dan Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini antara lain Pembinaan dan Kemitraan Lembaga Keagamaan; Pembinaan Petugas Haji Daerah; Pembinaan Manasik Haji bagi Masyarakat dan jemaah haji; Pembinaan Petugas di tanah Suci.

Adapun hasil yang telah dicapai pada Program ini antara lain Pemberdayaan Forum Komunikasi Lembaga Dakwah di 5 Wilayah Kotamadya; Pembinaan Usaha Produktif Pondok Pesantren di 5 Wilayah Kotamadya; tersedianya Peta Penyebaran Tempat Ibadah; Terjalinnnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga keagamaan di Propinsi DKI Jakarta melalui kegiatan Konsolidasi Lembaga-lembaga Keagamaan; Pembinaan Calon Jemaah Haji sebanyak 5.000 Orang; Penyelenggaraan Embarkasi (Pemberangkatan jemaah haji) dan Debarkasi (Pemulangan jemaah haji); Pengadaan Buku Keagamaan dan Sarana Tempat Ibadah; dan Peningkatan Sarana Prasarana keagamaan. Dari kegiatan yang berada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

Dan pada program ini ada kegiatan yang tidak dapat terserap anggarannya secara penuh, yaitu kegiatan penyeteroran BPIH, dan kegiatan pengadaan kebutuhan petugas haji. Kegiatan ini tidak terserap anggarannya dikarenakan kuota jamaah haji DKI Jakarta tahun 2005 berjumlah 11.000 orang dan untuk tahun 2006 menurun menjadi 7.000 orang, sehingga dengan penurunan jumlah jamaah ini berpengaruh pada komposisi jumlah petugas haji daerah, yang pada tahun 2005 sebanyak 103 orang menjadi 64 orang pada tahun 2006, sehingga mempengaruhi juga perlengkapan untuk operasional petugas haji.

## **2) Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pilar-pilar sosial masyarakat, meningkatkan SDM dan fasilitas sarana prasarana kesejahteraan sosial dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan anak terlantar, dan memantapkan penanganan PMKS, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program dan 27 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial diarahkan untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar; Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita, anak jalanan, dan korban narkoba. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini antara lain melakukan pembinaan Kesejahteraan terhadap anak, remaja, keluarga dan lanjut usia; Perlindungan dan Pelayanan bagi Korban Bencana dan Musibah Sosial lainnya, Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan; Penanganan Masalah Penyandang Cacat dan Tuna Sosial dan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Sosial (WBS) Panti Sosial.

Adapun hasil yang telah dicapai pada Program ini antara lain Terlaksananya Bimbingan Penguatan Kemandirian Anak sebanyak 350 orang, Bhakti Sosial dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) dan Bhakti Sosial Remaja di 5 Wilayah Kotamadya, pengendalian dan pengawasan pelayanan kesos anak

di 5 Wilayah Kotamadya, Bimbingan Sosial Remaja di Daerah Rawan Konflik, Bimbingan Penguatan Kemandirian Keluarga Miskin di 5 Wilayah Kotamadya, Pelayanan Sosial Orang Terlantar, Penguatan Kemandirian Penerimaan Santunan Langsung Tunai RTM BBM, Pengadaan persediaan sandang dan pangan bantuan korban bencana dan Penyelenggaraan dapur umum bagi korban bencana. Dari kegiatan yang berada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

- b) Program Peningkatan Peran Serta Sosial Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas TKSM, Orsos/LSM dan dunia usaha yang aktif dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dan Meningkatkan jumlah pekerja sosial dan TKSM terdidik yang dapat didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini antara lain Partisipasi sosial masyarakat dan dunia usaha, dan Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain Meningkatkan kesadaran gender di masyarakat melalui Pelatihan kader Perspektif Gender di 5 Wilayah Kotamadya; Menguatkan jaring-jaring kerja Sosial di Masyarakat melalui kegiatan Pengembangan dan Penguatan Lintas Sektor Pemberdayaan Pilar-Pilar Sosial; Meningkatkan kerjasama lembaga orsos, Pokja Kesuma dan BKKKS di DKI Jakarta; Meningkatkan Kinerja para TKSM, Orsos dalam Pelayanan Masyarakat melalui Pelatihan Manajemen Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi Orsos Tingkat Dasar dan Lanjutan; dan Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pembinaan; PSM, orsos, yayasan, pokjakesuma dan lembaga keagamaan. Dari kegiatan yang berada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

- c) Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman, diarahkan untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat dalam permasalahan pemakaman dan telah dilaksanakan antara lain kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemakaman, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman, dan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pemakaman. Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terlaksananya pengadaan

tanah TPU Jeruk Purut, urugan tanah TPU Jeruk Purut, urugan TPU Pondok Kelapa, Tanah Kusir, *cut and fill* TPU Pondok Rangun, selain itu pembangunan jalan aspal, di beberapa TPU, pembagunan turap, batu kali, pembangunan saluran beton dan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias di beberapa TPU serta rehab kantor–kantor TPU, terlaksananya penyuluhan pemakaman melalui media cetak, Koordinasi lintas sektoral pengadaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman, pengadaan ramuan jenazah, kain kafan, peti jenazah bagi tunawan. Dari kegiatan yang berada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

### **3) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat**

Fungsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan prakarsa serta partisipasi masyarakat sebagai sumber daya insani pembangunan dalam upaya pemerataan pelaksanaan pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik serta terciptanya masyarakat Jakarta sebagai warga kota yang mandiri dan sejahtera. Melalui fungsi ini diharapkan masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya melalui pemanfaatan potensi yang ada padanya agar mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aspirasinya. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program dan 16 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a). Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, diarahkan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembinaan terhadap PMKS dalam hal keterampilan untuk dapat hidup mandiri tanpa merugikan orang lain, menurunkan tingkat kerawanan sosial serta pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin. Untuk mendukung program tersebut telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan akses informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) masyarakat, peningkatan ketahanan masyarakat kelurahan dan peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terselenggaranya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kelurahan, pelatihan teknologi tepat guna pengawetan dan peningkatan kualitas makanan serta penyusunan pola penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b). Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, diarahkan untuk meningkatkan peran dewan kelurahan dalam menjalankan fungsinya, meningkatkan peran warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan serta meningkatkan usaha-usaha rumah-tangga yang memperoleh dana bergulir. Untuk mendukung program ini telah dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan akses pembangunan lingkungan masyarakat, peningkatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyiapan instalasi pengolahan air limbah rumah tangga (TTG yang ramah lingkungan) di 6 wilayah, sosialisasi program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) melalui media elektronik dan cetak di 6 wilayah dan penyusunan kebijakan lembaga keuangan mikro (LKM) di 267 kelurahan.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

- c). Program Pemberdayaan Perempuan, diarahkan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Untuk mendukung program ini telah dilaksanakan kegiatan antara lain pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 400 orang, sosialisasi

kesadaran gender bidang kesehatan reproduksi perempuan serta peningkatan keterampilan pengusaha kecil perempuan.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

#### **4) Fungsi Pelestarian Budaya Dan Permuseuman**

Fungsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, dan melakukan pembinaan dan pengembangan museum dan peninggalan cagar budaya/sejarah yang dapat diharapkan berpotensi untuk pengembangan pariwisata daerah. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program dan 10 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, diarahkan untuk mewujudkan sistem nilai budaya Betawi yang diperkaya oleh budaya nasional yang serasi dan kondusif, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Seni Budaya ; Peningkatan manajemen pembinaan dan pelayanan Seni dan Budaya dan Permuseuman ; dan Peningkatan kreatifitas dan kualitas pelaku Seni Budaya.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada nilai budaya sendiri, berkembangnya budaya dan kesenian Betawi sebagai sumber daya pengembangan pariwisata daerah, terwujudnya sistem nilai budaya Betawi yang diperkaya oleh budaya baru yang serasi dan kondusif.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- b) Program Pengembangan Museum dan Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya / Sejarah , diarahkan untuk meningkatkan sistem informasi seni budaya, peninggalan sejarah dan permuseuman, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Peningkatan Informasi dan Publikasi Museum Serta Benda Cagar Budaya ; Peningkatan Kualitas Pelayanan Museum dan BCB

dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Museum, BCB dan Lingkungan Cagar Budaya.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain bertambahnya keragaman obyek wisata yang berbasis seni, budaya dan peninggalan sejarah, meningkatnya publikasi kebudayaan dan permuseuman, meningkatnya kualitas dan profesionalisme para seniman, budayawan, pemerhati seni, pengelola/pemilik benda cagar budaya serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen.

- c) Program Pengawasan Pemugaran, diarahkan untuk meningkatkan apresiasi pelajar dan masyarakat akan peninggalan bersejarah, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pengawasan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Kegiatan Seni Budaya.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain tersedianya data yang akurat terhadap kondisi lingkungan pemugaran, meningkatnya pengawasan terhadap kegiatan seni budaya serta meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan seni budaya kepada pelajar dan masyarakat.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

## **5) Fungsi Olahraga dan Kepemudaan**

Fungsi olah raga dan kepemudaan ditujukan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan dan mengorganisasikan dirinya sebagai wahana pendewasaan untuk melindungi seluruh generasi muda dari bahaya destruktif. Disamping itu juga meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan pemasalan olah raga secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga, pendidikan olah raga dan pembinaan pramuka. Untuk mendukung fungsi ini telah dilaksanakan 3 program dan 12 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka, diarahkan untuk meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan eksistensi organisasi remaja/pelajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pramuka ; Pengembangan Aktivitas Kepemudaan ; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain meningkatnya kemampuan, pengetahuan, wawasan dan kualitas remaja dalam rangka menjadikan generasi muda yang mandiri dan tangguh serta meningkatkan rasa nasionalisme.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

- b) Program Peningkatan Prestasi Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah serta meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pembinaan Olahraga Prestasi ; Kejuaraan/Invitasi Olahraga tingkat Daerah, Nasional, Regional dan Internasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga prestasi.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terbinanya cabang olahraga prestasi, terselenggaranya kejuaraan/invitasi olahraga tingkat daerah tahun 2006, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga prestasi di Provinsi DKI Jakarta.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

- c) Program Pembinaan Olahraga Masyarakat , diarahkan untuk meningkatkan minat masyarakat berolahraga, dan telah dilaksanakan kegiatan antara lain Pembinaan Olahraga Karyawan dan Masyarakat ; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga masyarakat.

Adapun hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terlaksananya program pemassalan dan pembibitan olahraga serta meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Dari kegiatan yang ada pada program ini seluruhnya telah mencapai 100 persen

**g. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.197.593.409.376,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah direalisasikan sebesar Rp953.700.842.637,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp243.892.566.739,00.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup terdiri dari 3 fungsi yaitu: Fungsi Sumber daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Dengan arah dan kebijakan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, dan pengendalian produksi, konsumsi serta aktivitas yang kurang ramah lingkungan.

Meminimalisir dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam.

**1) Fungsi Sumber Daya Alam**

Dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil tambang dan energi guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta mengendalikan penggunaan air tanah oleh instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk mewujudkan kegiatan prioritas dimaksud, telah dilaksanakan 2 program dengan 20 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Sumber Daya Pertambangan dan Energi, diarahkan untuk melakukan pengembangan data informasi, meningkatkan pelayanan kebutuhan energi & sumber daya mineral, serta penyusunan program dan penyelenggaraan energi migas & ketenagalistrikan.

Pada tahun anggaran 2006 Program ini melaksanakan kegiatan antara lain ialah, Penyelenggaraan ESDM melalui pengelolaan teknis administratif, pembinaan SDM sarana penunjang serta data informasi yang memadai, Pengembangan dan Pengolahan Data Geologi Struktur Bawah Tanah, Pengembangan dan Pengelolaan Perusahaan Energi Sumber Daya Mineral, Pengawasan dan Penertiban, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Pertambangan Umum, Pengembangan dan Perusahaan Migas,

Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Energi Migas dan Ketenaga Listrik.

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah: terselenggaranya Energi Sumber Daya Mineral untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan teknis administratif, meningkatnya data informasi, dan terpenuhinya kebutuhan energi, terdistribusinya gas untuk busway, terdistribusinya BBM solar genset PLTD di Kep. Seribu serta terlaksananya pengawasan dan pembinaan pemanfaatan energi migas dan ketenagalistrikan. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- b) Program Pengembangan Sumber Air Tanah, diarahkan untuk mengelola sumber air tanah melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber air tanah, Pada tahun anggaran 2006 Program ini melaksanakan 4 kegiatan antara lain ialah Penyelenggaraan dan pengembangan Pelayanan Perijinan, Pemantauan dan Pembinaan Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pengembangan data Informasi dan Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral.

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah: Terkendalinya pemanfaatan air bawah melalui peningkatan pelayanan air bawah tanah sesuai standarisasi dan optimalisasi perijinan, Terpantaunya dan terbinanya usaha pemanfaatan air bawah tanah, terlaksananya pengembangan model bawah tanah berbasis data digital dan dampak dewaterisasi dan studi dan evaluasi kualitas air bawah tanah di 5 wilayah kotamadya. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen

## **2) Fungsi Lingkungan Hidup**

Dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi laut sebagai sumber daya ekonomi, transportasi dan pariwisata, fungsi sungai/kali sebagai sumber daya ekonomi dan pariwisata, peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan fungsi sungai dan laut serta terkendalinya emisi gas pencemar udara, terkendalinya pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan swasta akan pentingnya lingkungan hidup, terlaksananya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang

lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, ruang interaksi publik dan taman kota.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud telah dilaksanakan 4 program dengan .... kegiatan.

Adapun rincian hasil masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan Program Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Kali Bersih, kemitraan & informasi kualitas lingkungan hidup, udara bersih dari sumber bergerak dan dari sumber tidak bergerak serta pada tahun anggaran 2006 Program ini melaksanakan 7 kegiatan antara lain ialah Peningkatan Program PBLL, Peningkatan Program Kali Bersih, Pengembangan pelestarian dan Pemulihan Sumber daya Air, Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk pelestarian Air, Peningkatan Pengendalian Pencemaran Udara sebagai Implementasi Perda 2 Tahun 2005.

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah terlaksananya program pelaksanaan kali bersih, Peningkatan daya manfaat sungai ciliwung sebagai Eko-Wisata Arung Sungai dan Kader Lingkungan serta Kampung ramah lingkungan, Terkendalinya Pencemaran Udara sebagai Implementasi Perda 2 Tahun 2005. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- b) Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan, diarahkan untuk pengawasan & pengendalian dampak lingkungan hidup, pelaksanaan tata praja lingkungan serta peningkatan penataan penegakan hukum lingkungan. Pada tahun anggaran 2006 melaksanakan kegiatan antara lain ialah, Pembinaan dan Pengendalian Teknis Amdal, Pembinaan dan Pengendalian Perijinan Lingkungan Hidup, Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan, Pengembangan dan Kemampuan Laboratorium dalam menunjang Penegakkan hukum Lingkungan, Tata Praja Lingkungan, Pengembangan Kapasitas Institusi dan SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan dan Monitoring Program Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Informasi dan Kemitraan Lingkungan Hidup, Peningkatan Pelaksanaan Sistem manajemen Mutu dalam rangka mempertahankan akreditasi, Pengendalian Pencemaran Limbah padat dan

B3 dan Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Masyarakat dan swasta terhadap Lingkungan Hidup.

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah terkoordinasinya program pentaatan pengelolaan lingkungan (RKL-RPL/UKL-UPL), terlaksananya pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL diberbagai sektor, terkoordinasinya dan terbinanya Bangun Praja, tersusunnya program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- c) Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan ruang interaksi publik, serta terciptanya keseimbangan lingkungan kehidupan yang lebih sehat, indah dan nyaman. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan, antara lain : Penyusunan dan Pengembangan Program Pertamanan, Pengadaan tanaman, Penyusunan Evaluasi Kegiatan Pertamanan, Perancangan Teknis Jalur Hijau Kota, Penelitian dan Pengembangan Teknik Budidaya Tanaman, Penyusunan Data dan Informasi, Pengembangan dan Penataan Jalur Hijau Jalan, Pengembangan dan Penataan Jalur Hijau Tepian Air, Pengembangan dan Penataan Jalur Hijau Penyempurna, Penghijauan RTH Permukiman Padat Penduduk, Perencanaan Sumber Daya pertamanan, Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Jalur Hijau Kota.

Hasil yang dicapai program ini adalah tersedianya pedoman dan standar operasional baku dalam penataan RTH Pertamanan kota, pengadaan tanaman maupun bibit siap pakai di tiga lokasi kebun bibit, tersusunnya laporan tahunan kegiatan Dinas Pertamanan, tertatanya jalur median jalan, tertatanya jalur hijau tepian air di tiga lokasi, tertatanya tanaman serta pemagaran Fly Over di tujuh lokasi, terbangunnya RTH di permukiman padat penduduk, serta tertata dan terpeliharanya sarana prasarana jalur hijau kota. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- d) Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas taman kota, tertatanya dengan baik penempatan ornamen dan *street furniture*, termasuk media luar ruang dan meningkatkan perencanaan keserasian ornamen kota terhadap unsur-unsur kota lainnya. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan, antara lain Perencanaan/ Perancangan Taman Kota, Pengembangan dan Penataan

Taman Kota, Refungsionalisasi Taman dan Jalur Hijau, Pengembangan dan Penataan Taman Bangunan, Pengembangan dan Penataan Taman Khusus, Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat dalam Kegiatan Pertamanan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian dan Pengamanan Parasarana/ Sarana Pertamanan, Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Pembudidayaan Tanaman dan Kebun Bibit, Perencanaan/ Perancangan Sarana keindahan Kota, Pembangunan dan Pemanfaatan Ornamen Kota, Penataan Instalasi Pertamanan, Pengendalian Instalasi dan Utilitas Kota, Penataan Dekorasi Kota, Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pertamanan, dan Pemeliharaan Prasarana/ Sarana keindahan Kota.

Hasil yang telah dicapai program ini adalah terbangunnya taman-taman kota, meningkatnya kualitas taman sebagai salah satu infrastruktur kota, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan serta pemeliharaan elemen estetika kota., terbangunnya ornamen kota dan kelengkapan taman di beberapa lokasi, terbangunnya pedestrian-pedestrian yang nyaman, terlaksananya event ibukota yang terlayani dengan tata hias kota, Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

### **3) Fungsi Kebersihan**

Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kebersihan serta tersedianya lokasi TPA (Tempat Pemusnahan Akhir) dan pengolahan sampah dengan teknologi penanganan yang tepat guna dan ramah Lingkungan .

Adapun rincian hasil masing-masing program adalah sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan, diarahkan untuk Peningkatan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah, pengelolaan air kotor, dan terbentuknya Badan Usaha di TPA Bantar Gebang pada Tahun Anggaran 2006 melaksanakan 31 kegiatan antara lain ialah, Peningkatan Kualitas jasa Operasional Persampahan, Jasa Pengelolaan Sampah untuk PD pasar di propinsi DKI Jakarta, Program Penanggulangan Limbah B3, Pembangunan Sarana Prasarana IPAK (Instalansi Pengolahan Air Kotor).

Hasil yang telah dicapai program ini adalah, tercapainya pengangkutan & pengelolaan sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke SPA dan TPA Bantar Gebang, tercapainya pengangkutan air kotor dari sumber ke IPAK (Instalansi Pengolahan Air Kotor), dan terpeliharanya sarana IPAK di

pulo Gebang dan Duri kosambi, Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- b) Program Peningkatan pelayanan kebersihan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas jasa operasional persampahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pada tahun anggaran 2006 Program ini melaksanakan 9 kegiatan antara lain ialah, Pembinaan peran serta masyarakat untuk peduli kebersihan, pelayanan operasional; terlaksananya pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat, terbatasnya pengadaan sarana penanggulangan sampah, pengadaan sarana pendukung Operasional Kebersihan.

Hasil yang telah dicapai program ini adalah terlaksananya pengadaan sarana penanggulangan sampah dan penunjang operasional penanggulangan sampah adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

#### **h. Bidang Sarana dan Prasarana Kota**

Pada tahun anggaran 2006 bidang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.804.145.924.013,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah direalisasikan sebesar Rp3.680.055.064.653,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp1.124.090.859.360,00.

Bidang Sarana dan Prasarana Kota terdiri dari 6 fungsi yaitu : Fungsi Kelengkapan Kota, Fungsi Tata Air, Fungsi Perhubungan, Fungsi Perumahan dan Permukiman, Fungsi Tata Ruang, Fungsi Tata Bangunan.

Dengan arahan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kota adalah meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana kota dalam memberi pelayanan dan daya dukung kota.

##### **1) Fungsi Kelengkapan Kota**

Dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum serta jaringan utilitas, pelayanan air bersih, dan pelayanan air limbah yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 4 program dengan 31 kegiatan

- a) Program pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas, diarahkan untuk tertatanya jaringan listrik, gas, air bersih serta air limbah. Pada tahun anggaran 2006 melaksanakan Kegiatan, antara lain : kegiatan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu, Pendukung Kegiatan Operasional, Penunjang Subdin Sarana Jaringan Utilitas dan Perencanaan Sarana Jaringan Utilitas

Hasil yang telah dicapai adalah beberapa kajian yang mendukung rencana penataan jaringan utilitas terpadu di Propinsi DKI Jakarta, serta tertandatanganinya rencana Kerja tahun 2006 antara Pemda DKI Jakarta dengan para pengguna jaringan utilitas di DKI Jakarta, khusus untuk pembangunan Ducting System di JL. HR Rasuna Said yang sedianya akan mulai dilaksanakan pada tahun 2006, tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan perlu adanya persiapan yang lebih baik terkait dengan penyusunan dokumen AMDAL, rencana pelaksanaan di lapangan dan perlu adanya perjanjian penggunaan jaringan utilitas antara swasta dengan Pemda DKI. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 80 persen.

- b) Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum, diarahkan untuk bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum. pada tahun anggaran 2006 melaksanakan 28 Kegiatan, antara lain : Perencanaan Fasilitas Penerangan Jalan dan Tempat Umum, Pembagunan Penerangan Jalan Kolektor, Lokal, Lingkungan, Ruang terbuka Hijau serta fasilitas – fasilitas umum dan Kegiatan Peningkatan Kualitas serta Perawatan Lampu di Kolektor, Lokal, Lingkungan, Ruang terbuka Hijau serta fasilitas – fasilitas umum yang sudah terpasang

Hasil yang telah dicapai pada program ini adalah bertambahnya jumlah titik lampu penerangan jalan Kolektor, Lokal, Lingkungan, Ruang terbuka Hijau serta fasilitas – fasilitas umum lainnya sebanyak + 6.800 titik lampu, serta meningkatnya kualitas titik lampu di jalan Kolektor, Lokal, Lingkungan, Ruang terbuka Hijau serta fasilitas – fasilitas umum lainnya sebanyak + 1.800 titik lampu, selain itu tingkat respon time yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- c) Program Pengembangan Pelayanan Air Limbah, diarahkan untuk meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan jaringan air limbah buangan pabrik, pertokoan, restoran, dll. Pada tahun anggaran 2006 melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan Pengolahan Air Limbah.

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain terbangunannya jaringan IPAL di pulau Untung Jawa, peningkatan IPAL di 7 lokasi yang tersebar di DKI Jakarta serta beberapa kajian yang mendukung pengelolaan sarana air limbah di DKI Jakarta. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 98 persen.

- d) Program Pengembangan Pelayanan Air Bersih, diarahkan untuk meningkatnya mutu pelayanan air bersih dan meningkatnya pemenuhan air baku untuk air bersih. Pada tahun anggaran 2006 melaksanakan 2 kegiatan adalah Pemeliharaan dan Pengkoordinasian Pembangunan Sarana Air Limbah.

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah terlaksananya monitoring dan pemulihan pencemaran air dan prasarana air limbah di DKI Jakarta. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

## **2) Fungsi Tata Air**

Dimaksudkan untuk melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya. Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 2 program dengan 12 kegiatan.

- a) Program Pengendalian Banjir, diarahkan untuk mengurangi titik rawan genangan banjir dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pengendalian banjir, saluran/kali, waduk/situ, pompa air dan pintu air. Pada tahun anggaran 2006 melaksanakan 10 Kegiatan antara lain : perencanaan dan kajian Pengendali Banjir, Pembangunan Sarana Prasarana Pengendali Banjir serta Irigasi dan Kegiatan Dedicated Banjir.

Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah terbangunnya sistem pengendali banjir berupa rumah pompa, pompa dan

pintu air; Saringan sampah, Rumah pompa di beberapa lokasi, terlaksananya pengawasan trace untuk situ dan sungai; terlaksananya pembebasan tanah BKT, terlaksananya layanan pembersihan saluran di 3 sistem aliran (Barat, Tengah, Timur), dan terpeliharanya serta teroperasikannya rumah pompa, pompa, pintu air; Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 80 persen.

- b) Program Peningkatan Drainase Kota, diarahkan untuk tertatanya rencana induk sistem drainase yang efektif dan efisien, meningkatnya kualitas sarana drainase kota, dan meningkatnya kapasitas pengaliran saluran penghubung dan saluran mikro/permukiman. Pada tahun anggaran 2006 melaksanakan Kegiatan : pembebasan tanah, pembangunan, dan pemeliharaan drainase kota, dan pemeliharaan saluran-saluran penghubung dan mikro/permukiman. Hasil yang telah dicapai pada program ini antara lain adalah , terbangunnya drainase kota/normalisasi, terlaksananya pemeliharaan drainase kota/pengerukan, dan terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase di 5 wilayah kota. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

### **3) Fungsi Perhubungan,**

Arah dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kota pada fungsi perhubungan adalah meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana perhubungan dalam memberikan pelayanan dan daya dukung kota. Strategi fungsi perhubungan ditujukan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sehingga mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kota besar seperti kemacetan lalu lintas, rendahnya pelayanan angkutan umum, rendahnya pelayanan untuk pejalan kaki dan lain lain.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a). Program Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan di daerah permukiman, tersedianya jalan arteri untuk kawasan pemukiman dan perdagangan, meningkatnya fasilitas trotoar untuk pejalan kaki. Pada tahun anggaran 2006 program ini melaksanakan kegiatan, antara lain: pemeliharaan jalan dan jembatan arteri/kolektor dan jalan

lokal, penyediaan lahan jalan untuk jalan dan jembatan pada koridor busway 4,5,6 dan 7, peningkatan jalan dan jembatan pada koridor busway 4,5,6 dan 7, pembangunan dan peningkatan simpang tak sebidang, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan arteri/kolektor dan lokal, pengadaan lahan untuk jalan dan jembatan arteri/kolektor, peningkatan fasilitas trotoar pada ruas jalan tertentu, pemeliharaan jalan dan jembatan arteri/kolektor, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada jalan arteri/kolektor

Hasil yang telah dicapai adalah terlaksananya perbaikan darurat ringan dan ringan (tutup lubang) di 5 wilayah DKI Jakarta, tersedianya lahan jalan untuk jalan dan jembatan pada busway koridor 4, 5, 6 dan 7 dan terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada busway koridor 4, 5, 6 dan 7, terselesaikannya pembangunan 2 underpass (UP. Kebayoran Lama dan Pasar Minggu) serta dimulainya pembangunan 1 Underpass (UP. KA Angkasa) dan terselesaikannya pembangunan 2 Flyover (FO. Martadinata, FO Roxy) serta dimulainya pembangunan 1 Flyover (FO. Yos Sudarso – Kelapa Gading), terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan (arteri, kolektor dan lokal), tersedianya lahan untuk jalan dan jembatan arteri/kolektor dan lokal, tersedianya fasilitas trotoar, tersedianya excavator standar dan terpeliharanya alat-alat besar. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- b). Program Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan, diarahkan untuk menurunkan tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, bertambahnya sarana pengaturan lalu lintas, meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum, terkendalinya penggunaan frekuensi radio dan tertatanya jaringan pos secara baik. Pada tahun anggaran 2006 program ini melaksanakan kegiatan antara lain: Pengendalian Lalu Lintas, Pengawasan dan Operasional Penertiban Angkutan Jalan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Jalan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Angkutan Umum, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pengaturan Lalu Lintas. Pengembangan dan Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, Pengembangan dan pengendalian terminal bus dan mobil barang,

Peningkatan dan penunjang SDM Perhubungan, Perencanaan dan Evaluasi sarana dan prasarana perhubungan, Pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pos dan telekomunikasi.

Hasil yang telah dicapai adalah terkendalinya dan terawasinya arus lalu lintas dan angkutan umum, tersedianya fasilitas penyeberangan orang, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, bertambah dan terpeliharanya halte dan jembatan penyeberangan orang, Terpeliharanya rambu-rambu, marka jalan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku, Terawatnya dan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor agar mendapatkan hasil uji yang akurat dan memperpanjang umur pemakaian, terpeliharanya dan terkendalinya kebersihan, taman dan bangunan di terminal bus, Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan mengenai tugas yang terkait dibidang perhubungan, terlaksananya perencanaan program, bertambahnya dan terpeliharanya peralatan pemantau, observasi dan pengawas frekuensi. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- c). Program Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum, diarahkan untuk tersedianya angkutan massal, Meningkatnya kedisiplinan awak angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, Tersedianya angkutan penumpang dan barang dari ke Kepulauan Seribu. Pada tahun anggaran 2006 program ini melaksanakan kegiatan antara lain: pengembangan sistem BRT/angkutan massal, pengawasan dan pengendalian operasional busway, Menunjang Sub Way, Pembangunan sarana/prasarana dan kegiatan lainnya untuk menunjang busway Koridor 4, 5, 6, dan 7, Pembangunan Prasarana Penunjang Pool Busway, Pengembangan kualitas layanan angkutan umum, Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana UPT pelabuhan penyebrangan.

Hasil yang telah dicapai adalah Tertatanya trayek angkutan umum akibat busway koridor 4,5,6 dan 7, terkendalinya lalu lintas dan angkutan di jalur busway, Terbangunnya/penyempurnaan pendukung lalu lintas, tersedianya angkutan umum busway koridor 4, 5, 6 dan 7, Tersedinya Pool Busway, Tersedianya bus sekolah, Terjadwalnya kepastian keberangkatan serta

terpeliharanya kapal penyeberangan ke Kepulauan Seribu. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

#### **4) Fungsi Perumahan dan Permukiman**

Fungsi ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, sehingga tersedia kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 3 program dengan 18 kegiatan.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Perumahan, diarahkan pada semakin seimbangya ketersediaan dan kebutuhan perumahan khususnya rumah susun bagi rakyat kecil dan meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapat hunian layak, yaitu dengan melaksanakan enam kegiatan antara lain: pembangunan rumah susun dan manajemen pemeliharaan, pelaksanaan manajemen penyediaan lahan permukiman, penyusunan kebijakan lahan perumahan dan permukiman, serta penyusunan peraturan penggalangan kemitraan.

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain: terbangunnya rumah susun di beberapa lokasi seperti pembangunan rusun di Kapuk Muara, Marunda, Pegadungan, Jatirawasari, Pondok Bambu, Pulo Jahe dan Karet Tengsin; Pembebasan tanah untuk rusun di lima lokasi; tersusunnya kebijakan lahan perumahan dan permukiman seperti tersosialisasinya program Dinas Perumahan; tersusunnya program pembangunan perumahan dan tersosialisasinya kebijakan perumahan. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- b) Program Pengembangan Lingkungan Permukiman, diarahkan pada semakin tertatanya lingkungan permukiman terutama di lingkungan kumuh dan di lingkungan rumah susun, melalui meningkatnya frekuensi pengawasan pengembangan lingkungan permukiman, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Pada program ini dilaksanakan lima kegiatan, antara lain : Perbaikan Lingkungan

Permukiman Kumuh, Pengendalian Permukiman, Penataan Kawasan Hunian, Penataan Tertib Hunian, dan Pengelolaan Rusun di segmen komersial.

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah : perbaikan sarana dan prasarana permukiman TA 2006; tersosialisasinya tertib penghunian rusun melalui sinetron maupun pembuatan video dokumenter; tersusunnya Raperda perumahan dan permukiman serta perawatan rumah susun di beberapa lokasi. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- c) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman, diarahkan untuk meningkatnya jumlah fasilitas permukiman yang layak, dan menurunkan jumlah permukiman di lokasi ilegal, dengan melaksanakan tujuh kegiatan, antara lain : Perencanaan Kawasan Permukiman Sehat, Pemberian bantuan hunian sementara (barak penampungan), Pembinaan administrasi, Pengadaan Fasilitas Kerja, pelaksanaan Pameran PRJ, Prokasih, Hari Air, Hari bumi dan hari habitat, Tertib penghunian rusun, dan pendukung kegiatan operasional kantor.

Hasil yang telah dicapai program ini antara lain adalah tersusunnya program permukiman TA 2006, terkelolanya barak penampungan, terlaksananya pameran PRJ, Prokasih, Hari Air, Hari Bumi dan Hari Habitat, serta terciptanya tata tertib penghunian rusun sewa-beli. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

## **5) Fungsi Tata Ruang**

Dimaksud untuk mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif, berdasarkan prinsip adil, efisiensi dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 4 program dengan 25 kegiatan. Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Program Perencanaan Ruang, diarahkan untuk mewujudkan instrumen pendukung rencana tata ruang wilayah yang semakin lengkap, meningkatnya luas kawasan yang tertata baik, meningkatnya partisipasi dan kesadaran

dalam penataan ruang. Pada tahun 2006, telah dilaksanakan 9 Kegiatan, antara lain : Penguatan Organisasi Ketatakotaan, Sosialisasi dan Pembinaan Perencanaan Kota, Pengolahan Data Dasar serta Pengkajian Struktur Ruang Kota.

Hasil yang telah dicapai program ini adalah : meningkatnya efisiensi pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2000 di 2 kecamatan dan 1 Suku Dinas; upgrading dan updating Peta Operasional Pelayanan, terselenggaranya penyuluhan/dialog Perencanaan dan Pelayanan Ketatakotaan kepada forum/lembaga masyarakat dan masyarakat, terobservasinya penerapan Rencana Ruang Makro Kota Jakarta serta tersedianya konsep pencapaian standar Green Ratio, Water Ratio dan Road Ratio. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- b) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, diarahkan guna tersedianya peraturan dan kajian pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penataan ruang. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan 3 Kegiatan, antara lain : Monitoring/Evaluasi Program Kerja dan Pelayanan Ketatakotaan, Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota serta Pengkajian Pemanfaatan Lahan.

Hasil yang telah dicapai program ini adalah : terlaksananya pengembangan administrasi pelayanan di 4 (empat) Seksi DTK Kecamatan, tersedianya trace MRT dan beberapa utilitas, tersedianya pola persebaran SPBU dan persebaran eksisting menara, tertata dan terpeliharanya dokumen Lembar Rencana Kota (LRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK). Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- c) Program Penataan dan Pengawasan Bangunan, diarahkan untuk melakukan penataan dan monitoring bangunan untuk mewujudkan tertib bangunan. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan 12 Kegiatan, antara lain : Pengawasan Perencanaan, Pelaksanaan, Penggunaan dan Kelayakan Bangunan, Pengembangan Sistem Pelayanan dan evaluasi kinerja dinas, Perencanaan dan Pelaksanaan Penomoran Bangunan, Pemetaan Tapak Bangunan, Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Bangunan, Peningkatan Operasional

Tindakan Penertiban Bangunan, Penanganan Sengketa dan Pengaduan, serta Peningkatan Pembinaan terhadap Masyarakat dan Pelaku Pembangunan.

Hasil yang telah dicapai program ini adalah : meningkatnya efektivitas pelayanan melalui Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 di 5 kecamatan, terlaksananya plotting tapak bangunan sampai dengan tahun 2004, tersedianya aplikasi informasi pengaduan masyarakat, tersedianya Pedoman Tata Cara Penilaian Struktur Bangunan, terlaksananya pemberkasan terhadap pelanggaran Perda 7 Tahun 1991 di Kecamatan Menteng, penyuluhan ketentuan membangun kepada pemilik/pengelola bangunan tinggi di Provinsi DKI Jakarta, terlaksananya penertiban bangunan di 5 kodya dan Kabupaten Kepulauan Seribu dan terekomendasikannya penjatuhan sanksi administratif bagi pemegang SIBP di 5 wilayah kotamadya. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

- d) Program Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis, diarahkan untuk mengembangkan potensi kawasan khusus/strategis, meningkatkan sarana dan prasarana publik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kawasan, mengembangkan potensi ekonomi serta berkurangnya perusakan dan penyalahgunaan lingkungan kawasan dengan melaksanakan 1 Kegiatan, yaitu : perencanaan pengembangan ruang kota.

Hasil yang telah dicapai program ini adalah : tersedianya arahan Pengembangan Pelabuhan di sepanjang Pantai Utara Jakarta serta kajian Pola Penyebaran Reklame di Sarana Prasarana Kota. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

## **6) Fungsi Tata Bangunan**

Dimaksud untuk menyediakan bangunan gedung pemda dan menata lingkungan yang secara memadai agar dapat terwujud tata ruang yang harmonis, adil dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sasaran dimaksud, telah dilaksanakan 1 program dengan 52 kegiatan.

Adapun program yang telah dilaksanakan adalah Program Penataan Bangunan dan Gedung Pemda, diarahkan guna terwujudnya penataan lingkungan dan tersedianya gedung pemda yang memadai untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan 52 kegiatan, antara lain : Perencanaan Bangunan Gedung Pemda, Pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Timur, Pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat, Pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Barat, Pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan, Pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Utara, Pembangunan Gedung Prasada Sarana Karya Provinsi DKI Jakarta, Peningkatan Kualitas dan Keandalan Gedung Tugu Monas, Pembangunan Gedung Arsip Provinsi DKI Jakarta, Pembangunan Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta serta Pembangunan Gedung Jakarta Islamic Center. Adapun pencapaian hasil program ini telah selesai 100 persen.

Hasil yang telah dicapai program ini adalah terbangun dan beroperasinya Gedung Blok C dan D Kantor Walikotamadya Jakarta Timur, peningkatan kulit luar dan interior Gedung Blok A Kantor Kotamadya Jakarta Pusat, terbangunnya Gedung Blok B dan Annex Kantor Walikotamadya Jakarta Barat, terbangunnya Gedung Sayap Belakang KWK Jakarta Selatan, terbangunnya Gedung Blok T/Parkir Walikotamadya Jakarta Utara, terselesaikan dan beroperasinya Gedung Prasada Sarana Karya Provinsi DKI Jakarta, terlaksananya Penataan Mekanikal dan Elektrikal Tugu Monas, terlaksananya Pembangunan Gedung Blok B dan D Gedung Arsip Provinsi DKI Jakarta, mulai dibangunnya Gedung DPRD/Blok H dan Blok G Balaikota (Eks. Kantor Dipenda), terealisasinya Penyelesaian Pembangunan Gedung Jakarta Islamic Center (wisma) dan Sarana Sosial Budaya.

## **2. Belanja Daerah Menurut Bagian Belanja**

Belanja daerah terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian Belanja Pelayanan Publik. Belanja aparatur daerah adalah bagian belanja yang terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal Aparatur yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan

yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja yang terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Tersangka yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

**a. Belanja Aparatur**

Bagian Belanja Aparatur Daerah pada Tahun Anggaran 2006 anggarannya dialokasikan sebesar Rp5.894.215.675.797,00 atau 32,44 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 telah terealisasi sebesar Rp5.025.977.951.358,80 atau 85,27 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp868.237.724.438,20

**b. Belanja Pelayanan Publik**

Bagian Belanja Pelayanan Publik pada Tahun Anggaran 2006 anggarannya dialokasikan sebesar Rp12.278.135.786.723,00 atau 67,56 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran telah terealisasi sebesar Rp10.135.599.844.847,00 atau 82,55 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.142.535.941.876,00

**3. Belanja Daerah Menurut Kelompok Dan Jenis Belanja**

Realisasi Belanja Daerah menurut Kelompok dan jenis Belanja, dapat terlihat pada tabel 4.24.

**Tabel 4.24**  
**Realisasi Belanja Daerah Menurut Kelompok dan Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2006**

No.	KELOMPOK/JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	<b>APARATUR</b>	<b>5.894.215.675.797,00</b>	<b>5.025.977.951.358,80</b>	<b>85,27</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>3.611.616.901.891,00</b>	<b>3.177.448.611.547,80</b>	<b>87,98</b>
	1. Belanja Pegawai	2.527.812.295.832,00	2.353.902.519.704,80	93,12
	2. Belanja Barang dan Jasa	950.126.849.176,00	718.619.619.351,00	75,63
	3. Belanja Perjalanan Dinas	7.879.600.000,00	4.561.587.610,00	57,89
	4. Belanja Pemeliharaan	125.798.156.883,00	100.364.884.882,00	79,78
<b>II</b>	<b>BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>	<b>1.232.738.213.444,00</b>	<b>1.000.304.345.569,00</b>	<b>81,14</b>
	1. Belanja Pegawai	548.072.273.363,00	475.910.427.841,00	86,83
	2. Belanja Barang dan Jasa	539.523.988.520,00	414.643.523.128,00	76,85
	3. Belanja Perjalanan Dinas	27.546.757.000,00	21.904.257.485,00	79,52
	4. Belanja Pemeliharaan	117.595.194.561,00	87.846.137.115,00	74,70
<b>III</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.049.860.560.462,00</b>	<b>848.224.994.242,00</b>	<b>80,79</b>
	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>12.278.135.786.723,00</b>	<b>10.135.599.844.847,00</b>	<b>82,55</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>2.744.863.199.798,00</b>	<b>2.642.833.052.817,00</b>	<b>96,28</b>
	1. Belanja Pegawai	2.576.075.628.327,00	2.500.959.651.573,00	97,08
	2. Belanja Barang dan Jasa	130.029.952.802,00	109.477.025.670,00	84,19
	3. Belanja Perjalanan Dinas	-	-	0,00
	4. Belanja Pemeliharaan	38.757.618.669,00	32.396.375.574,00	83,59
<b>II</b>	<b>BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>	<b>4.385.574.418.138,00</b>	<b>3.848.124.910.982,00</b>	<b>87,75</b>
	1. Belanja Pegawai	853.385.273.285,00	784.103.561.587,00	91,88
	2. Belanja Barang dan Jasa	2.570.789.170.464,00	2.208.731.552.067,00	85,92
	3. Belanja Perjalanan Dinas	17.192.640.200,00	12.003.517.509,00	69,82
	4. Belanja Pemeliharaan	944.207.334.189,00	843.286.279.819,00	89,31
<b>III</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.778.351.486.464,00</b>	<b>3.365.935.001.364,00</b>	<b>70,44</b>
<b>IV</b>	<b>BELANJA BANTUAN KEU</b>	<b>293.633.682.323,00</b>	<b>277.712.410.684,00</b>	<b>94,58</b>
<b>V</b>	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>	<b>75.713.000.000,00</b>	<b>994.469.000,00</b>	<b>1,31</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>18.172.351.462.520,00</b>	<b>15.161.577.796.205,80</b>	<b>83,43</b>

Sementara itu menurut jenis belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dapat digambarkan pada tabel 4.25.

**Tabel 4.25**  
**Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2006**

No.	JENIS	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI %	REALISASI	
				(Rp)	(%)
I	<b>BELANJA ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>6.356.480.101.689,00</b>	<b>34,98</b>	<b>5.820.281.664.364,80</b>	<b>91,56</b>
	1. Belanja Pegawai	5.103.887.924.159,00	80,29	4.854.862.171.277,80	95,12
	2. Belanja Barang dan Jasa	1.080.156.801.978,00	16,99	828.096.645.021,00	76,66
	3. Belanja Perjalanan Dinas	7.879.600.000,00	0,12	4.561.587.610,00	57,89
	4. Belanja Pemeliharaan	164.555.775.552,00	2,59	132.761.260.456,00	80,67
II	<b>BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN</b>	<b>5.618.312.631.582,00</b>	<b>30,92</b>	<b>4.848.429.256.551,00</b>	<b>86,29</b>
	1. Belanja Pegawai	1.401.457.546.648,00	24,94	1.260.013.989.428,00	89,90
	2. Belanja Barang dan Jasa	3.110.313.158.984,00	55,36	2.623.375.075.195,00	84,34
	3. Belanja Perjalanan Dinas	44.739.397.200,00	0,80	33.907.774.994,00	75,79
	4. Belanja Pemeliharaan	1.061.802.528.750,00	18,90	931.132.416.934,00	87,69
III	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.828.212.046.926,00</b>	<b>32,07</b>	<b>4.214.159.995.606,00</b>	<b>72,31</b>
IV	<b>BELANJA BANTUAN KEU</b>	<b>293.633.682.323,00</b>	<b>1,62</b>	<b>277.712.410.684,00</b>	<b>94,58</b>
V	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>	<b>75.713.000.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>994.469.000,00</b>	<b>1,31</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>18.172.351.462.520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.161.577.796.205,80</b>	<b>83,44</b>

Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Belanja Administrasi Umum**

Pada Tahun Anggaran 2006, Belanja Administrasi Umum dialokasikan sebesar Rp6.356.480.101.689,00 atau 34,98 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp5.820.281.664.364,80 atau 91,56 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp536.198.437.324,20.

Belanja Pegawai dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp5.103.887.924.159,00 atau 80,29 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.854.862.171.277,80 atau 95,12 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp249.025.752.881,20.

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.080.156.801.978,00 atau 16,99 persen dari total kelompok Belanja

Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp828.096.645.021,00 atau 76,66 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp252.060.156.957,00.

Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp7.879.600.000,00 atau 0,12 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.561.587.610,00 atau 57,89 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.318.012.390,00.

Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Administrasi Umum dianggarkan sebesar Rp164.555.775.552,00 atau 2,59 persen dari total kelompok Belanja Administrasi Umum. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp132.761.260.456,00 atau 80,67 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp31.794.515.096,00.

#### **b. Belanja Operasi Dan Pemeliharaan**

Kelompok Belanja Operasi Pemeliharaan dialokasikan sebesar Rp5.618.312.631.582,00 atau 30,92 persen dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.848.429.256.551,00 atau 86,29 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp769.883.375.031,00.

Belanja Pegawai dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp1.401.457.546.648,00 atau 24,94 persen dari total kelompok Belanja Operasi Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp1.260.013.989.428,00 atau 89,90 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp141.443.557.220,00.

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp3.110.313.158.984,00 atau 55,36 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun

anggaran telah terealisasi sebesar Rp2.623.375.075.195,00 atau 84,34 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp486.938.083.789,00.

Belanja Perjalanan Dinas dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp44.739.397.200,00 atau 0,80 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp33.907.774.994,00 atau 75,79 persen sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.831.622.206,00.

Belanja Pemeliharaan dalam kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp1.061.802.528.750,00 atau 18,90 persen dari total kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp931.132.416.934,00 atau 87,69 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp130.670.111.816,00.

#### **c. Belanja Modal**

Kelompok Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp5.828.212.046.926,00 atau 32,07 persen dari total Belanja Daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp4.214.159.995.606,00 atau 72,31 persen, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.614.052.051.320,00.

#### **d. Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria :

- Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan.

Obyek belanja transfer adalah organisasi sosial, organisasi profesi dan organisasi lainnya seperti biaya operasional KPUD, BP Trans Jakarta, bantuan Fakultas

Keperawatan Universitas Indonesia, Yayasan Jantung Anak Indonesia dan Bantuan Masjid Al Mujahidin.

Kelompok Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp293.633.682.323,00 atau 1,62 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.277.712.410.684,00 atau 94,58 persen.

#### **e. Belanja Tidak Tersangka**

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah. Belanja Tidak Tersangka juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar Rp75.713.000.000,00 atau 0,42 persen dari total belanja daerah. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp994.469.000,00 atau 1,31 persen. Rendahnya realisasi menunjukkan kinerja perencanaan keuangan dimana pengeluaran dalam Belanja Tidak Tersangka hanya digunakan untuk hal-hal mendesak yang memerlukan penanganan segera.

### **C. PEMBIAYAAN DAERAH**

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, bahwa Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam struktur APBD komponennya terdiri dari Sumber Penerimaan Daerah yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Transfer dari Dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan. Sedangkan Sumber Pengeluaran Daerah meliputi pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo, Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.

Dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasi Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah adalah sebesar Rp3.107.087.920.428,39 sedangkan yang bersumber dari Pengeluaran Daerah sebesar Rp2.283.128.625.323,12

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi sumber pembiayaan adalah sebagai berikut :

#### **1. Sumber Penerimaan Daerah**

Realisasi dari Penerimaan Daerah sebesar Rp3.107.087.920.428,39 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2005 sebesar Rp2.808.713.836.800,39 dan Transfer dari Dana Cadangan Daerah sebesar Rp298.374.083.628,00

#### **2. Sumber Pengeluaran Daerah**

Untuk sasaran pengeluaran yang terjadi pada pembiayaan, pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 realisasinya sebesar Rp2.283.128.625.323,12 Adapun realisasi pengeluaran tersebut terdiri :

❖ Penyertaan Modal Pemerintah	Rp	223.908.851.656,00
❖ Pembayaran Utang Pokok		
Yang Jatuh Tempo	Rp	38.623.570.157,00
❖ Sisa Lebih Perhitungan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	2.020.596.203.510,12

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan ini diperoleh dari Sisa Penyerapan Anggaran Belanja sebesar Rp3.010.773.666.314,20 dan sisa

Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3.843,00 dikurangi defisit pendapatan sebesar Rp990.177.466.647,47 sehingga secara netto sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2006 sebesar Rp2.020.596.203.510,12.